



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

APBN KITA

KINERJA & FAKTA

Kinerja APBN 2023 Kuat dan Sehat
sebagai *shock absorber* dan mendukung transformasi ekonomi

DESEMBER 2023

Foto: Storypost - Julyas Gradha Putra

Scan dan Unduh
APBN KITA



ISSN link
APBN KiTa





“Kinerja ekonomi Indonesia masih terjaga dengan pertumbuhan di kisaran 5 persen. Dengan perekonomian yang tetap terjaga, ini akan menjadi landasan kita untuk masuk 2024 supaya tetap menjaga momentum pemulihan, serta memperbaiki pemerataan dan kesejahteraan.

Kita tetap bisa menjaga masyarakat dan ekonomi kita melalui fungsi *countercyclical* dan *shock absorber* APBN, serta memberikan afirmasi kepada kelompok-kelompok yang paling rentan.”

**Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati**

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	7
Perkembangan Ekonomi Makro	15
Postur APBN	19
Laporan Khusus	22
Penerimaan Pajak	51
Penerimaan Bea dan Cukai	57
Penerimaan Negara Bukan Pajak	63
Belanja Pemerintah Pusat	69
Transfer ke Daerah	77
Pembiayaan Utang	83





Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Pengarah: Pimpinan Unit Eselon I Kemenkeu **Penanggung Jawab:** Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-

Liability Committee Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:**

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan**

Redaksi: Tim *Deputies Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim

Teknis *Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan, Tim Redaksi Penyusun Publikasi APBN KiTa. **Editor:** Tim Editor Penyusun Publikasi APBN KiTa

Desain Grafis, Layout dan Foto: Biro KLI Kementerian Keuangan.

Alamat Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.



Pendapatan Negara sebesar Rp2.462,37 triliun atau 99,97 persen dari target dan tumbuh 3,57 persen (yoy).

Realisasi tersebut terdiri atas Penerimaan Pajak sebesar Rp1.671,37 triliun (97,28 persen dari target), tumbuh 6,53 persen (yoy), serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp244,97 triliun (80,80 persen dari target), turun 12,58 persen (yoy).



Penerimaan Negara Bukan Pajak telah mencapai Rp544,21 triliun (123,29 persen dari target), tumbuh 3,22 persen (yoy).

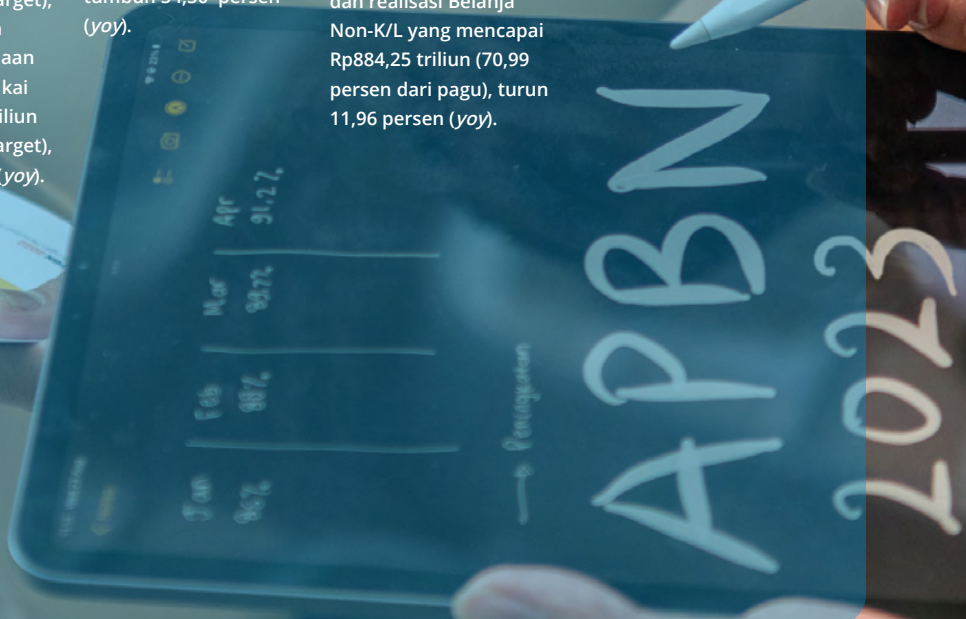
Penerimaan Hibah sebesar Rp1,82 triliun, tumbuh 54,50 persen (yoy).



Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.744,44 triliun atau 78,99 persen dari pagu, turun 5,73 persen (yoy), yang terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp890,18 triliun (88,94 persen dari pagu), tumbuh 1,41 persen (yoy), dan realisasi Belanja Non-K/L yang mencapai Rp884,25 triliun (70,99 persen dari pagu), turun 11,96 persen (yoy).



Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp736,10 triliun (90,35 persen dari pagu), tumbuh 0,60 persen (yoy).



Ringkasan Eksekutif

Prospek perekonomian global belum memperlihatkan penguatan dan tetap dalam ketidakpastian. Aktivitas ekonomi global masih dalam situasi kontraksi yang ditandai dengan *Purchasing Managers' Index* (PMI) sektor manufaktur dan sektor jasa yang masih dibawah level 50. Perkembangan harga komoditas energi dan pangan dalam tren peningkatan sehingga memberikan tekanan terhadap penurunan laju inflasi global. Di pasar keuangan global, tekanan nilai tukar di negara-negara berkembang

yang terjadi sejak September 2023 mulai mereda. Di sisi domestik, perkembangan ekonomi nasional masih tetap kuat dan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat masih tetap kuat.

Pendapatan Negara dan Hibah

Hingga 30 November 2023, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat Rp2.462,37 triliun atau 99,97 persen dari target APBN 2023¹. Capaian tersebut lebih tinggi Rp84,85 triliun dari periode yang sama tahun lalu, dengan

1. Persentase terhadap target dan pagu mengacu pada APBN 2023

menjaga tren kinerja yang masih positif sejak awal tahun 2023. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tumbuh 3,57 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode bulan sebelumnya. Realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.916,34 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp544,21 triliun, dan realisasi Hibah Rp1,82 triliun. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP berturut-turut sebesar 3,64 persen (yoy) dan 3,22 persen (yoy), sedangkan capaian masing-masing komponen Pendapatan Negara tersebut terhadap target berturut-turut Perpajakan 94,81 persen dan PNBP 123,29 persen (telah melebihi target).

Realisasi penerimaan Perpajakan bersumber dari penerimaan Pajak serta Kepabeanan dan Cukai. Hingga akhir November 2023 capaian penerimaan Pajak tercatat Rp1.671,37 triliun dan Kepabeanan dan Cukai Rp224,97 triliun. Kinerja penerimaan Perpajakan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan periode bulan sebelumnya. Kinerja penerimaan Perpajakan tersebut didukung oleh kinerja Pajak yang tumbuh 6,53 persen (yoy), sementara

Kepabeanan dan Cukai masih berkontraksi 12,58 persen (yoy). Kontraksi tersebut lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya. Realisasi penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai tersebut masing-masing 97,28 persen dan 80,80 persen terhadap target. Kinerja perpajakan dipengaruhi oleh faktor pemulihan ekonomi, moderasi harga komoditas, dan dampak dari kebijakan perpajakan yang tidak berulang di 2023.

Perpajakan

Penerimaan Pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas Rp904,11 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) Rp667,78 triliun. Kontribusi kedua komponen penerimaan Pajak tersebut terhadap total penerimaan Pajak masing-masing 54,09 persen dan 39,95 persen. Secara lebih detail, penerimaan PPh Nonmigas masih ditopang oleh tiga terbesar komponen penerimaan PPh Nonmigas yang bersumber dari PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Final. Kontribusi ketiganya mencapai 73,94 persen dari total penerimaan PPh Nonmigas. Berdasarkan pertumbuhannya, PPh Nonmigas meningkat 6,10 persen (yoy). Kenaikan tersebut

didukung oleh peningkatan dua komponen utama, yaitu PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 21 yang berturut-turut tumbuh 15,79 persen (yoy) dan 16,80 persen (yoy), meskipun kinerja keduanya melambat dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan PPh Final pada periode ini tercatat kembali berkontraksi 28,14 persen (yoy). Kontraksi tersebut lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan komponen penerimaan PPh Nonmigas tersebut dipengaruhi oleh utilisasi tenaga kerja akibat perbaikan gaji dan upah, masih terjadinya moderasi harga komoditas, restitusi, dan kebijakan yang tidak berulang. Realisasi penerimaan Pajak dari komponen penerimaan PPN/PPnBM terutama ditopang oleh PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. Kontribusi kedua komponen tersebut masing-masing 60,98 persen dan 34,65 persen terhadap total penerimaan PPN/PPnBM. Secara kumulatif, PPN/PPnBM tumbuh 8,41 persen (yoy), meningkat jika dibandingkan periode sebelumnya. Secara lebih rinci, hingga periode ini PPN DN tumbuh 17,11 persen (yoy), namun PPN Impor berkontraksi 5,21 persen (yoy). Kenaikan penerimaan PPN DN didorong oleh faktor peningkatan aktivitas ekonomi

dan konsumsi masyarakat yang tetap terjaga, namun pengaruh pembayaran kompensasi BBM yang tidak berulang serta peningkatan dari restitusi PPN DN memberi tekanan terhadap kinerja PPN DN. Sedangkan kinerja PPN Impor dipengaruhi oleh nilai impor yang lebih rendah dibanding tahun lalu.

Capaian realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai terdiri dari penerimaan Cukai Rp187,43 triliun, Bea Masuk (BM) Rp45,85 triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp11,68 triliun. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terutama didukung oleh penerimaan dari Cukai, khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT) dengan kontribusi mencapai 73,47 persen terhadap total penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Sampai dengan periode ini, kinerja komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh hanya pada penerimaan BM 0,15 persen (yoy), lebih rendah dari periode sebelumnya. Sedangkan penerimaan Cukai dan BK berkontraksi masing-masing 4,25 persen (yoy) dan 69,80 persen (yoy). Kontraksi kedua penerimaan tersebut lebih rendah dari periode sebelumnya.

Kinerja positif BM didorong

oleh kenaikan tarif efektif BM akibat pertumbuhan BM dari komoditas utama seperti kendaraan roda 4 dan beras, serta apresiasi kurs Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah. Sementara itu, kinerja penerimaan Cukai berkontraksi akibat penurunan produksi HT pada Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan I. Hal ini menyebabkan tarif rata-rata tertimbang CHT menurun. Di sisi lain, kinerja BK juga menurun terutama akibat faktor harga rata-rata *Crude Palm Oil* (CPO) yang lebih rendah meskipun secara volume ekspor CPO meningkat, serta penurunan harga dan volume ekspor komoditas tembaga dan bauksit.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP pada periode ini mencapai Rp544,11 triliun, 123,27 persen terhadap target atau tumbuh 3,20 persen (yoy). Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Sementara itu realisasi Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) dan PNBP Lainnya berkontraksi 1,10 persen (yoy) dan 14,34 persen (yoy).

Secara lebih rinci, realisasi

Pendapatan SDA mencapai Rp235,89 triliun atau berkontraksi sebesar 1,10 persen (yoy). Kontraksi tersebut disebabkan oleh perlambatan pendapatan SDA Migas 19,93 persen (yoy) akibat penurunan harga minyak mentah (ICP) dan *lifting* minyak bumi. Sedangkan SDA Nonmigas tumbuh 23,91 persen (yoy). Peningkatan Pertumbuhan SDA Nonmigas terutama disumbang oleh royalti batubara yang tumbuh 25,95 persen (yoy) dan Nikel yang tumbuh 26,69 persen (yoy). Meskipun rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) dan volume penjualan batubara menurun, kenaikan tarif royalti batubara mampu menutupi penurunan tersebut.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari KND mencatatkan tren positif dengan capaian Rp81,54 triliun atau tumbuh 100,86 persen (yoy). Capaian tersebut terutama didorong oleh kenaikan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perbankan dan sektor nonperbankan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari BLU juga meningkat dengan capaian realisasi Rp80,09 triliun atau tumbuh 6,80 persen (yoy). Sedangkan Dari PNBP Lainnya, Rp146,69 triliun atau berkontraksi 15,34 persen (yoy). Penurunan realisasi tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan *Domestic Market*

Obligation (DMO) 73,51 persen (yoy) dan penurunan produksi hasil tambang 40,80 persen (yoy). Sedangkan pendapatan PNPB Kementerian/Lembaga (K/L) tumbuh 7,94 persen (yoy).

Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 November 2023 mencapai Rp2.510,54 triliun, 82,01 persen dari pagu atau turun 3,96 persen (yoy). Realisasi tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp1.774,44 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp736,10 triliun. Realisasi BPP dipengaruhi oleh peningkatan realisasi belanja modal, mencapai 23,58 persen (yoy). Peningkatan tersebut terutama untuk mendukung proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan (sarpras hankam).

Realisasi Belanja Negara juga didorong oleh belanja pegawai yang meningkat 2,82 persen (yoy) mencapai Rp383,10 triliun. Selain itu realisasi Belanja Sosial sedikit berkontraksi 7,40 persen (yoy) dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP).

Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir November 2023 mencapai Rp202,26 triliun, 67,76 persen dari pagu atau menurun 1,77 persen (yoy). Realisasi Belanja Subsidi tersebut meliputi Subsidi Energi Rp134,37 triliun, turun 9,30 persen (yoy) dan subsidi Nonenergi Rp67,89 triliun, naik 17,56 persen (yoy).

Realisasi Belanja Subsidi Energi terutama bersumber dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kg yang mencapai Rp78,20 triliun, 56,10 persen dari pagu. Realisasi subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg menurun 23,64 persen (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan ICP rata-rata sebesar 20,47 persen (yoy) selama periode Januari-November 2023. Namun, apabila dilihat dari sisi volume, konsumsi jenis BBM tertentu (JBT) dan LPG 3 Kg justru meningkat. Total volume konsumsi JBT (minyak tanah, solar, dan biosolar) hingga Oktober 2023 meningkat 1,46 persen (yoy) dan untuk volume konsumsi LPG 3 Kg naik 3,72 persen (yoy)². Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp56,17 triliun atau 77,39 persen dari pagu atau naik 22,81 persen (yoy). Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar

2. Data volume konsumsi JBT dan LGP 3 Kg menggunakan referensi dua bulan sebelum pelaporan

rupiah terhadap dolar Amerika 2,92 persen (yoy).

Selanjutnya, realisasi Belanja Subsidi Nonenergi pada Januari sampai dengan November 2023 Rp67,89 triliun, 78,47 persen dari pagu atau naik 17,56 persen (yoy). Realisasi tersebut didominasi oleh subsidi kredit program Rp39,50 triliun atau 58,18 persen dari total realisasi subsidi nonenergi. Peningkatan ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk melakukan percepatan pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Subsidi pupuk sebagai kontributor kedua terbesar dengan realisasi Rp17,70 triliun atau 26,07 persen terhadap realisasi subsidi nonenergi. Realisasi subsidi pupuk pada periode ini sedikit menurun 9,92 persen (yoy) yaitu dari Rp19,65 triliun menjadi Rp17,70 triliun. Hal itu sejalan dengan penyaluran volume pupuk bersubsidi yang juga menurun dari 6,89 juta ton pada November 2022 menjadi 5,71 juta ton pada November 2023. Realisasi subsidi pajak Rp7,43 triliun, naik 3,92 persen (yoy). Sedangkan subsidi *Public Service Obligation* (PSO) mencapai Rp3,26 triliun atau turun 6,05 persen (yoy).

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD)

sampai dengan 30 November 2023 mencapai Rp736,10 triliun atau 90,35 persen dari pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp4,38 triliun, tumbuh 0,60 persen (yoy). Kenaikan realisasi itu ditopang oleh peningkatan kepatuhan syarat salur atas jenis TKD sebagai berikut: 1) realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Rp370,76, lebih tinggi Rp1,74 atau 0,47 persen (yoy); 2) realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Rp118,18 triliun, lebih tinggi Rp0,43 triliun atau 0,36 persen (yoy); 3) realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Rp116,30 triliun lebih tinggi Rp4,40 triliun atau 3,93 persen (yoy) terutama dipengaruhi oleh penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan Rp10,5 triliun, lebih tinggi Rp2,36 triliun atau 28,92 persen (yoy); 4) realisasi Dana Keistimewaan (Dais) DI Yogyakarta sebesar Rp1,37 triliun, lebih tinggi Rp50 milyar atau 3,99 persen (yoy); 5) realisasi Dana Desa Rp65,18 triliun, lebih tinggi Rp1,87 triliun atau 2,96 persen (yoy) ; 6) realisasi Insentif Fiskal Rp6,00 triliun, lebih tinggi Rp0,50 triliun atau 9,17 persen (yoy); dan 6) Hibah ke Daerah yang mencatatkan realisasi Rp1,72 triliun.

Sementara itu, jenis TKD yang mengalami penurunan adalah DAK Fisik dan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Realisasi DAK Fisik Rp39,35 triliun, lebih rendah Rp3,14 triliun atau minus 7,40 persen (yoy) disebabkan pagu DAK Fisik untuk Infrastruktur Publik Daerah pada tahun 2023 yang lebih kecil daripada pagu DAK Fisik tahun 2022. Akan tetapi, persentase realisasi DAK Fisik sampai bulan November 2023 telah mencapai 73,65 persen dari pagu APBN 2023. Realisasi ini lebih baik dibandingkan realisasi DAK Fisik November 2022 yang sebesar 69,8 persen dari pagu APBN 2022. Sedangkan realisasi Dana Otsus Rp17,24 triliun, lebih rendah Rp3,20 triliun atau minus 15,63 persen (yoy) sejalan dengan penurunan pagu Dana Otsus Provinsi Aceh di tahun 2023. Namun demikian, realisasi Dana Otsus pada akhir November 2023 secara persentase telah mencapai 100 persen dari pagu.

Pembiayaan

Realisasi anggaran sampai dengan akhir November 2023 terdapat defisit Rp48,17 triliun. Defisit tersebut disebabkan karena Pendapatan Negara dan Hibah sampai periode ini mencapai Rp2.462,37 triliun, sedangkan Belanja mencapai Rp2.510,54 triliun. Sementara itu, realisasi Pembiayaan Anggaran mencapai Rp282,31 triliun, 58,82 persen terhadap pagu. Realisasi Pembiayaan tersebut didominasi

oleh Pembiayaan Utang Rp332,39 triliun, 47,74 persen terhadap pagu yang terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) Rp292,53 triliun dan Pinjaman (Neto) Rp39,84 triliun. Pinjaman (Neto) berasal dari Pinjaman Dalam Negeri (Neto) Rp8,36 triliun dan Pinjaman Luar Negeri (Neto) Rp31,50 triliun.

Sampai dengan periode ini, Pemerintah menarik Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) Rp11,17 triliun dan membayar cicilan pokok Pinjaman Dalam Negeri Rp2,81 triliun. Di sisi lain, Pemerintah juga menarik Pinjaman Luar Negeri (Bruto) Rp105,43 triliun dan membayar Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Rp73,93 triliun. Di samping Pembiayaan Utang, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pembiayaan untuk Investasi Rp53,33 triliun yang digunakan untuk Investasi Pemerintah Rp19,48 triliun, Investasi kepada BLU Rp46,72 triliun, Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional Rp1,56 triliun dan memperoleh Penerimaan Kembali dari Investasi Rp14,82 triliun. Pemerintah juga memberikan Pinjaman Rp3,11 triliun dan merealisasikan anggaran untuk Pembiayaan Lainnya Rp469,9 miliar.

Perkembangan
Ekonomi Makro



Perkembangan Ekonomi Makro

Di tengah pelemahan prospek ekonomi global, aktivitas ekonomi nasional masih kuat dan akan menguat di kuartal IV 2023. Perkembangan *leading indicators* (indikator penentu) yakni PMI Manufaktur dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di November 2023 tetap kuat. Aktivitas sektor manufaktur menguat yang ditandai dengan PMI manufaktur di November 2023 tercatat 51,7, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks Keyakinan

Konsumen di November 2023 tercatat 123,6 yang menunjukkan optimisme konsumen terhadap prospek ekonomi ke depan tetap kuat. Di tengah penguatan indikator ekonomi nasional, pemerintah tetap waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global.

Tekanan terhadap pasar keuangan nasional mereda di tengah ketidakpastian perkembangan pasar keuangan global. Indeks harga saham gabungan tercatat pada level 7.119,52 pada 18 Desember 2023, menggambarkan pasar saham domestik masih

tetap kuat. Pergerakan nilai tukar Rupiah di Desember 2023 mengalami tekanan dan mengacu pada Kurs Tengah Transaksi Bank Indonesia tercatat Rp15.503 per USD pada 18 Desember 2023. Sehingga, rata-rata nilai tukar Rupiah tercatat Rp15.248 per USD hingga 18 Desember 2023, atau mengalami apresiasi 0,57 persen dibandingkan posisi nilai tukar Rupiah di awal tahun 2023. Inflasi November 2023 tercatat 2,86 persen (yoy), meningkat dari Oktober 2023 yang tercatat 2,56 persen (yoy). Perkembangan inflasi ini dipengaruhi oleh peningkatan inflasi *volatile food* terutama produk hortikultura. Posisi cadangan devisa nasional terus berada pada posisi yang kuat dalam menopang daya tahan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal. Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir November 2023 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, tercatat USD138,1 miliar.

Perkembangan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia terus meningkat. Kondisi ini menandakan bahwa aktivitas pariwisata nasional tumbuh dan berdampak positif terhadap perkembangan sektor terkait lainnya. Sektor yang terkait dengan aktivitas pariwisata secara langsung adalah sektor

makanan dan akomodasi, hotel, transportasi, serta perdagangan. Kunjungan wisman ke Indonesia pada Oktober 2023 mencapai 978,50 ribu kunjungan, naik 33,27 persen (yoy). Wisman yang berkunjung didominasi oleh wisman yang berasal dari Malaysia (14,16 persen), Australia (13,18 persen), dan Singapura (9,17 persen). Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman sampai dengan Oktober 2023 tercatat 9,49 juta kunjungan. Kondisi Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Oktober 2023 tercatat 53,02 persen, naik 0,71 poin (yoy)³.

3. Data kunjungan wisman dan TPK menggunakan referensi dua bulan sebelum pelaporan

Halaman Ini Dikosongkan

Realisasi APBN



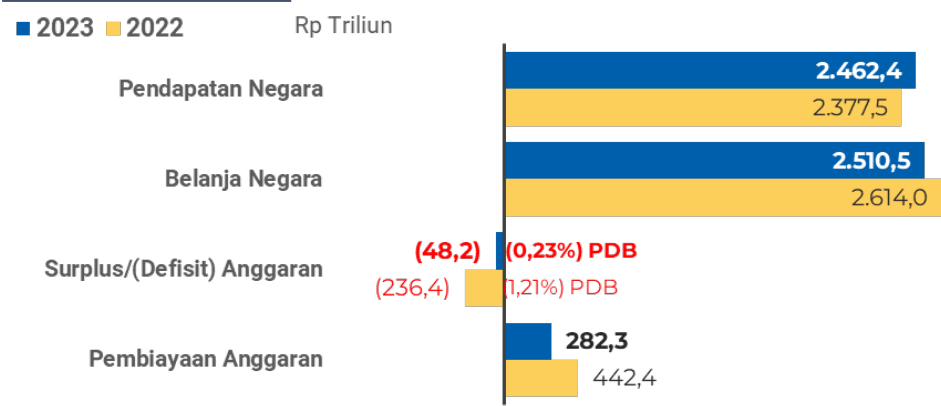
Postur APBN

Sampai dengan 30 November 2023, APBN defisit 0,23 persen terhadap PDB (periode yang sama di tahun 2022 defisit APBN 1,21 persen terhadap PDB). Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.462,37 triliun atau meningkat 3,57 persen (yoy). Di sisi lain, realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.510,54 triliun atau turun 3,96 persen (yoy).

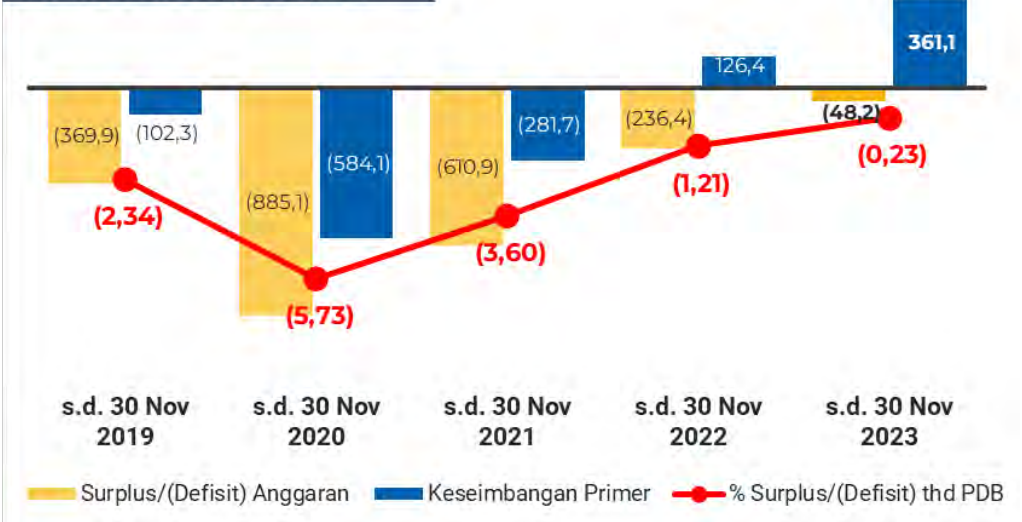
Realisasi Pendapatan Negara mencapai 99,97 persen dari target, terdiri atas:

Realisasi Penerimaan Perpajakan Rp1.916,34 triliun atau 94,81 persen dari target, tumbuh 3,64 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri atas Penerimaan Pajak Rp1.671,37 triliun, 97,28 persen dari target, tumbuh 6,53 persen (yoy) serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp244,97 triliun, 80,80 persen dari target, atau berkontraksi 12,58 persen (yoy).

Realisasi APBN
s.d. 30 Nov 2022 - 2023



Perkembangan Surplus/Defisit dan Keseimbangan Primer



Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp544,21 triliun, 123,29 persen dari target atau tumbuh 3,22 persen (yoy).

Realisasi Penerimaan Hibah Rp1,82 triliun, tumbuh 54,50 persen (yoy).

Realisasi Belanja Negara telah mencapai 82,01 persen dari pagu, terdiri atas:

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.744,44 triliun, 78,99 persen dari pagu, dan berkontraksi 5,73 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri atas realisasi Belanja K/L Rp890,18 triliun, 88,94 persen dari pagu atau naik 1,41 persen (yoy) dan realisasi Belanja non-K/L Rp884,25 triliun, 70,99 persen dari pagu atau berkontraksi 11,96 persen (yoy).

Realisasi Transfer ke Daerah Rp736,10 triliun, 90,35 persen dari alokasi atau tumbuh 0,60 persen (yoy).

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara tersebut, sampai dengan 30 November 2023, defisit APBN mencapai Rp48,17 triliun (0,23 persen terhadap PDB) dan surplus keseimbangan primer mencapai Rp361,10 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp282,31 triliun (47,20 persen dari target).

Realisasi APBN s.d. 30 November 2023

APBN (triliun rupiah)	2022				2023			
	Perpres 98/2022	Realisasi s.d. 30 November	% thd Perpres 98/2022	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 30 November	% thd APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	2.266,20	2.377,52	104,91	39,90	2.463,02	2.462,37	99,97	3,57
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.265,62	2.376,34	104,89	40,00	2.462,62	2.460,55	99,92	3,54
1. Penerimaan Perpajakan	1.783,99	1.849,09	103,65	40,63	2.021,22	1.916,34	94,81	3,64
a. Pajak	1.484,96	1.568,87	105,65	44,92	1.718,03	1.671,37	97,28	6,53
b. Kepabeanan dan Cukai	299,03	280,22	93,71	20,65	303,19	244,97	80,80	(12,58)
2. PNBPN	481,63	527,25	109,47	37,82	441,39	544,21	123,29	3,22
II. Penerimaan Hibah	0,58	1,18	203,50	(42,46)	0,41	1,82	445,28	54,50
B. Belanja Negara	3.106,43	2.613,96	84,15	13,14	3.061,18	2.510,54	82,01	(3,96)
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.301,64	1.882,23	81,78	17,69	2.246,46	1.774,44	78,99	(5,73)
1. Belanja K/L	945,75	877,83	92,82	(6,35)	1.000,84	890,18	88,94	1,41
2. Belanja Non K/L	1.355,89	1.004,41	74,08	51,72	1.245,61	884,25	70,99	(11,96)
II. Transfer Ke Daerah	804,78	731,72	90,92	2,91	814,72	736,10	90,35	0,60
C. Keseimbangan Primer	(434,36)	126,38	(29,10)	144,86	(156,75)	361,10	(230,36)	185,72
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(840,23)	(236,44)	28,14	61,30	(598,15)	(48,17)	8,05	(79,63)
% Surplus/(Defisit) thd PDB	(4,50)	(1,21)			(2,84)	(0,23)		
E. Pembiayaan Anggaran	840,23	442,37	52,65	(26,82)	598,15	282,31	47,20	(36,18)

Penyerahan DIPA 2024 dan Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024

Pada 29 November 2023, bertempat di Istana Negara, telah dilaksanakan acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) K/L serta Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden bersama seluruh Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, K/L, Gubernur dan Kepala Daerah. DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD dalam bentuk digital diserahkan oleh Bapak Presiden dan sekaligus

sebagai simbol dimulainya pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024.

Serangkaian proses penyusunan APBN tahun 2024, termasuk pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), berjalan sangat baik hingga ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) APBN Nomor 19/2023. Hal ini terjadi karena terdapat sinergi yang baik antar semua pemangku kepentingan

untuk mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen fiskal dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan guncangan yang mengancam perekonomian dan masyarakat. Selain itu, APBN juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mensejahterakan masyarakat.

APBN 2024 mengusung tema Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, menuju Indonesia Maju dengan terus membangun fondasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, dan reformasi lainnya, serta mendukung penguatan pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terus menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung program prioritas nasional.

Di tengah gejolak ekonomi global yang menyebabkan kenaikan dan volatilitas harga komoditas, peningkatan inflasi, kenaikan suku bunga di negara maju, arus modal keluar dan tekanan terhadap nilai tukar, serta El Nino yang mempengaruhi harga pangan domestik, kinerja perekonomian Indonesia tetap terjaga dengan baik dengan pertumbuhan sekitar 5 persen dalam kurun waktu 8 kuartal terakhir.

Keseimbangan eksternal melalui neraca pembayaran juga tetap terjaga dengan kinerja neraca perdagangan mengalami surplus 42 bulan, dan transaksi berjalan yang terus terjaga memberikan kontribusi terhadap stabilitas perekonomian Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 disusun dengan asumsi indikator makro yang optimis namun tetap waspada terhadap dinamika yang akan terjadi.

Pada APBN 2024, target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.802,3 triliun didukung upaya optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global. Sektor perpajakan diharapkan terus didorong oleh kinerja ekonomi yang membaik, implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemberian insentif fiskal yang terarah dan terukur, serta basis perpajakan dan tingkat kepatuhan yang semakin baik. Sementara itu, optimalisasi PNBPN dilakukan dengan menjaga kualitas layanan publik, kelestarian lingkungan, serta mendorong perbaikan tata kelola.

Dari sisi belanja, Pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa Belanja Negara 2024 ditetapkan Rp3.325,1 triliun, meningkat 6,7 persen dibandingkan APBN 2023

(Perpres 75 Tahun 2023). Belanja Negara tersebut terdiri atas BPP Rp2.467,5 triliun, dan Transfer ke Daerah Rp857,6 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat akan diarahkan untuk: Perbaikan kualitas SDM, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada.

Transfer ke Daerah dialokasikan Rp857,6 triliun, meningkat 5,3 persen dibandingkan APBN 2023 (Perpres 75 Tahun 2023). Peningkatan tersebut untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah terutama guru dan tenaga kesehatan; meningkatkan pelayanan publik di daerah; mendukung operasional sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan kesetaraan; serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan *stunting*.

Sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah juga akan terus diperbaiki dan ditingkatkan dari tahap perencanaan hingga penganggaran berdimensi regional dan penguatan intervensi belanja di daerah.

Selanjutnya, defisit APBN tahun 2024 ditetapkan 2,29 persen PDB atau Rp522,8 triliun yang akan dikelola dengan pembiayaan yang terukur, efisien, serta akuntabel termasuk menjaga rasio utang.

Acara penyerahan DIPA 2024 dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena DIPA untuk APBN 2024 dilakukan melalui proses digitalisasi semenjak perencanaan penganggaran sampai melalui proses penandatanganan DIPA yang dilakukan secara elektronik. Proses bisnis pengesahan dokumen anggaran DIPA ini menyederhanakan proses bisnis manual dari semula 12 tahap menjadi 4 tahap secara elektronik menggunakan aplikasi SAKTI. Penerapan penandatanganan DIPA secara elektronik akan tersertifikasi dan merupakan salah satu upaya penjaminan keamanan dan kenirsangkalan (penolakan terhadap mereka yang memiliki otoritas anggaran). Upaya menjamin kenirsangkalan sumber daya juga akan menjamin keamanan data dan informasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola, berupa:

i. Kemudahan dan kenyamanan dalam proses penandatanganan dokumen;

ii. Kecepatan proses penandatanganan dokumen;

iii. Efisiensi anggaran cetak dan kirim dokumen;

iv. Pro-lingkungan atau *green budgeting*; dan

v. Peningkatan keamanan data.

Ibu Menteri Keuangan mengharapkan agar DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD 2024 dapat segera ditindaklanjuti, agar APBN 2024 dapat dilaksanakan segera di awal tahun sehingga masyarakat dan perekonomian langsung dapat merasakan manfaatnya. Dengan menjaga kualitas belanja, memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan APBD dengan APBN, mengantisipasi ketidakpastian melalui *automatic adjustment*, dan yang paling penting menjaga integritas dan tata kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada masyarakat.

Sebagai penutup, Ibu Menteri Keuangan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kabinet dan pimpinan daerah atas kerjasama yang baik didalam pelaksanaan APBN untuk mendukung program Kabinet Indonesia

Maju. APBN berupaya maksimal memenuhi seluruh program-program prioritas pembangunan nasional, dari mulai melindungi rakyat, kelompok rentan, memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, membangun hingga ke pelosok daerah, dan juga meningkatkan pertahanan dan keamanan.

Presiden Jokowi dalam pidatonya kepada para Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri dan pimpinan Lembaga Non Kementerian, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan Walikota/ Bupati, menyampaikan arahan bahwa saat ini kita sedang menghadapi tantangan dinamika dan prospek perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian. Kondisi geopolitik yang semakin hangat serta dampak dari perubahan iklim yang semakin terasa membuat kita harus tetap waspada.

Berkaitan dengan anggaran, Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa : (1) gunakan anggaran yang telah diberikan dengan disiplin, teliti dan tepat sasaran; (2) kedepankan transparansi dan akuntabilitas; (3) eksekusi sesegera mungkin belanja pada awal Januari 2024; (4) antisipasi perubahan dan ketidakpastian melalui

automatic adjustment; (5) Khusus kepada pemerintah daerah, agar memperkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dimana belanja APBD harus selaras dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat; (6) Manfaatkan dana Transfer Ke Daerah untuk perbaikan dan peningkatan layanan publik (Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur), dan (7) kembangkan alternatif pembiayaan kreatif lainnya, agar dapat meningkatkan iklim investasi.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pemerintahan periode 2019-2024, dan Presiden Jokowi menyampaikan pesan agar anggaran dapat dioptimalkan dengan menuntaskan agenda pembangunan yang belum diselesaikan untuk memperkuat fondasi bagi pemerintahan selanjutnya.

Momentum Refleksi Penguatan Integritas Pegawai Kemenkeu

Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan negara memastikan penggunaan APBN sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sinergi pengawasan bersama terhadap keuangan negara menjadi hal yang penting demi menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Dalam menjaga APBN, Kementerian Keuangan juga terus aktif membangun budaya antikorupsi dan semangat integritas.

Korupsi sendiri merupakan *extraordinary crime* yang pemberantasannya tidak cukup hanya dengan pendekatan represif, melainkan lebih mendasar melalui tindakan pencegahan. Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan negara menjadi salah satu pihak yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi.

"Korupsi adalah musuh dunia di dalam cita-cita untuk mencapai kesejahteraan yang

berkeadilan. Oleh karena itu, Hakordia ini jangan dijadikan sebatas peringatan rutin saja, melainkan harus menjadi momentum untuk terus bersinergi melawan dan memberantas korupsi,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Kementerian Keuangan pada 14 Desember 2023.

Kementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderal menyelenggarakan acara Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan Tahun 2023 dengan tema “Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju” secara *hybrid* di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kemenkeu. Kegiatan tahunan ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara kepada masyarakat atas peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Acara tersebut dihadiri oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan mengundang seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam arahannya, Menkeu Sri Mulyani mengingatkan bahwa korupsi adalah perang melawan diri sendiri dan merupakan perang yang tidak pernah

berakhir. Oleh karena itu, dalam memperingati Hari Antikorupsi tidak hanya dilakukan refleksi, namun juga perlu evaluasi kritis secara sistematis baik pada level individu maupun pada level institusi.

Menkeu Sri Mulyani juga berkomitmen penuh untuk melawan korupsi, dan dia berharap komitmen ini dapat diikuti oleh seluruh jajaran, mulai dari Wakil Menteri Keuangan, eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, pejabat fungsional, hingga pelaksana. Menurut Menkeu Sri Mulyani, memerangi korupsi bukan masalah komitmen pribadi melainkan sebuah komitmen bersama untuk menegakkan martabat Republik Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa beliau tetap memiliki komitmen penuh untuk melawan korupsi dan tidak akan menyerah.

Komitmen Kemenkeu dalam melawan korupsi ini juga tercermin pada banyaknya unit yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada 6 Desember 2023 lalu, Kementerian Keuangan menerima apresiasi langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai Instansi Pemerintah peraih predikat WBK WBBM terbanyak tahun 2023 yakni 167 unit kerja yang



memenuhi WBK dan 13 unit WBBM. Hingga akhir tahun ini, sebanyak 904 unit kerja atau sekitar 95 persen dari seluruh unit kerja di Kementerian Keuangan telah menerima predikat Zona Integritas (ZI) dan WBK. Menkeu Sri Mulyani meminta agar capaian ini dapat segera digenapkan menjadi 100 persen.

“Seperti saya sampaikan, korupsi itu seperti noda, yang lima persen tolong disempurnakan. Karena orang tidak melihat Kementerian Keuangan sebagai suatu kementerian yang punya zona integritas dan memiliki wilayah bebas korupsi kalau masih ada lima persen yang belum WBK,” pinta Menkeu Sri Mulyani.

Menkeu juga meminta untuk terus dilakukan evaluasi atas predikat ZI/WBK secara jelas, berkesinambungan, namun *unpredictable*. Selain itu, diperlukan strategi yang mampu menggambarkan resiliensi dari Kementerian Keuangan terhadap antikorupsi. Predikat ZI/WBK inipun tidak hanya menjadi sertifikasi semata, melainkan benar-benar membangun wilayah Kementerian Keuangan yang berintegritas.

Pada puncak peringatan Hakordia Kemenkeu kali ini, Menkeu Sri Mulyani secara langsung memberikan penganugerahan kepada lima perwakilan Unit Kerja Berpredikat WBK dengan Capaian Terbaik serta kepada Unit Pengendali Gratifikasi

(UPG) Unit Kerja dengan Jumlah Pelaporan Penolakan Gratifikasi Tertinggi Tahun 2023. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada unit kerja yang telah berhasil membangun budaya integritas.

Menkeu Sri Mulyani juga mengajak seluruh peserta untuk bersama menjaga integritas agar Kementerian Keuangan tetap menjadi institusi yang mampu memberi contoh dalam perjuangan tanpa henti melawan ancaman korupsi.

“Jangan biarkan nila setitik merusak integritas Kemenkeu. Kita harus terus saling menguatkan, agar kita bisa memenangkan pertempuran tersebut. Semangat berjuang, semangat bertempur, jangan pernah lelah melawan korupsi,” tegas Menkeu Sri Mulyani.

Puncak Peringatan Hakordia ini sebagai momen refleksi internal Kementerian Keuangan untuk mengurai benang merah integritas dalam rangka penguatan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Acara ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa integritas perlu dijaga dan diupayakan secara maksimal oleh seluruh komponen.

Seluruh Unit Eselon I, Lembaga Nasional *Single Windows* (LNSW), dan *Special Mission Vehicles* (SMV), BLU dengan semangat Kementerian Keuangan Satu telah menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan di tingkat pusat maupun di tingkat unit vertikal. Kegiatan tersebut diantaranya 24 webinar tema integritas dan antikorupsi, 9 lomba tema integritas, lelang barang ex-gratifikasi, edukasi generasi muda, aktivasi konten media sosial tentang integritas dan budaya antikorupsi, serta 8 *community event*. Rangkaian kegiatan tersebut diikuti sebanyak 21.046 peserta baik dari eksternal maupun internal Kementerian Keuangan.

“Tujuan Hakordia Kemenkeu difokuskan untuk refleksi internal, bagaimana menguatkan integritas dalam bentuk *tone from the top* kepada seluruh pegawai Kemenkeu, khususnya dari Ibu Menteri Keuangan selaku pimpinan tertinggi,” ungkap Inspektur Jenderal Awan Nurmawan Nuh saat menyampaikan laporan penyelenggaraan.

Ayo Manfaatkan Insentif PPN DTP Pembelian Rumah

Kondisi ekonomi global saat ini memberikan dampak perlambatan pada sektor perumahan di Indonesia. Menurut data Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKABN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF), terdapat tren perlambatan sektor properti seperti konstruksi dan *real estate* yang dapat menyebabkan perlambatan aktivitas investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

bangunan. Perlambatan PMTB bangunan dapat menahan kinerja investasi (PMTB) secara keseluruhan. Hal ini dapat memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

Padahal, selama periode 2018-2022 sektor properti mempunyai peran yang strategis dan berkontribusi 14-16 persen terhadap PDB. Sektor properti juga menyerap 13,8 juta tenaga kerja per

tahun. Khususnya di 2022, mampu menyerap 10,2 persen dari total lapangan kerja. Dari sisi kontribusi penerimaan pajak, sektor properti menghasilkan pendapatan pajak pusat sekitar Rp185 triliun per tahun atau 9,3 persen dari penerimaan pajak nasional. Sektor properti juga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 31,9 persen dari total penerimaan PAD pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Mengingat urgensi tersebut dan mendukung sektor industri properti guna meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah memberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah melalui PMK Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. *Beleid* yang terbit 21 November 2023 itu mengatur bahwa PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan, mendapat fasilitas DTP untuk Tahun Anggaran 2023.

Fasilitas PPN DTP diberikan hanya untuk dasar pengenaan pajak (DPP) sampai dengan Rp2 miliar dan harus

memenuhi kriteria tertentu. Kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas tersebut antara lain: memiliki kode identitas rumah, memiliki harga jual maksimal Rp5 miliar, diserahkan secara fisik paling lambat 31 Desember 2024, merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni, serta diberikan maksimal satu unit rumah tapak/satu unit hunian rumah susun untuk satu orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu satu tahun. Dalam hal pembeli telah memanfaatkan PPN DTP lain sebelum PMK ini terbit, maka orang tersebut masih dapat memanfaatkan PPN DTP berdasarkan PMK ini.

Pajak Pertambahan Nilai DTP yang dimaksud dalam PMK tersebut merupakan PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat penandatanganan akta jual beli atau penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris. Serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau satuan rumah susun siap huni. Bukti penyerahan tersebut berupa berita acara serah terima (BAST) sejak 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Berita acara serah terima tersebut harus didaftarkan dalam aplikasi Sikumbang paling lama akhir bulan



berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.

Ada dua tarif yang digunakan untuk menghitung PPN DTP ini. Pertama, sebesar 100 persen dari PPN yang terutang dari bagian DPP sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual rumah paling banyak Rp5 miliar untuk penyerahan tanggal BAST mulai 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Tarif kedua 50 persen dari PPN yang terutang dari bagian DPP sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar untuk penyerahan tanggal BAST mulai 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 untuk Masa Pajak November 2023. Pajak Pertambahan Nilai DTP diberikan untuk PPN

terutang Masa Pajak November 2023 sampai dengan Masa Pajak Desember 2023. Untuk Masa Pajak November 2023 merupakan PPN terutang mulai 1 November 2023 sampai dengan 30 November 2023.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan rumah tapak dan/atau satuan rumah susun wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN DTP. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam membuat faktur pajak yaitu untuk PPN DTP 100 persen (BAST 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024):

untuk harga jual sampai dengan Rp2 miliar membuat dua faktur pajak kode 07 dengan DPP masing-masing 50

persen dari harga jual DTP;

untuk harga jual di atas Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar membuat dua faktur pajak kode 07 dengan DPP masing-masing 50 persen dari harga jual sampai dengan Rp2 miliar DTP; dan faktur pajak kode 01 untuk bagian harga jual lebih dari Rp2 miliar yang tidak ditanggung pemerintah.

Sedangkan untuk 50 persen (BAST 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024):

untuk harga jual sampai dengan Rp2 miliar membuat satu faktur pajak kode 07 dengan DPP 50 persen dari harga jual DTP; dan satu faktur pajak kode 01 dengan DPP 50 persen dari harga jual tidak DTP.

untuk harga jual di atas Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar membuat satu faktur pajak kode 07 dengan DPP 50 persen dari harga jual DTP; dan satu faktur pajak kode 01 dengan DPP 50 persen dari harga jual tidak DTP. Untuk bagian harga jual lebih dari Rp2 miliar membuat faktur pajak kode 01 dengan DPP bagian harga lebih dari Rp2 miliar tidak DTP.

Bagi calon pembeli, ini adalah saat yang tepat untuk membeli properti. Bagi pengusaha properti orang pribadi yang belum mengajukan PKP, ini

adalah saat yang tepat pula untuk mengajukan permohonan pengukuhan sebagai PKP, agar memanfaatkan peluang dan memperkuat daya beli calon pembeli rumah tapak dan/ atau satuan rumah susun yang memenuhi kriteria.

Jelang Tutup Tahun dan Songsong Lembaran Baru, Tetap Optimis Berikan Kinerja Terbaik

Desember bisa jadi merupakan bulan pamungkas dalam setahun. Kendati jelang tutup tahun, semangat dalam memberikan performa terbaik harus tetap kita kobarkan demi mengelola #UangKita.

Pada awal bulan ini, tepatnya tanggal 3 Desember 2023, kita memperingati hari istimewa bagi para penyandang kebutuhan khusus, yaitu Hari Disabilitas Sedunia. Kementerian Keuangan

(Kemenkeu) selaku pengelola #UangKita, berkomitmen penuh dalam memberikan kesetaraan dengan pengalokasian anggaran demi pembangunan sarana-prasarana umum yang mengakomodasi kebutuhan khusus Kawan Disabilitas.

Selain itu, pada tanggal 9 Desember 2023, kita memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), dengan tema kali ini “Sinergi Berantas Korupsi, untuk Indonesia Maju”. Sinergi merupakan salah

satu dari nilai Kemenkeu, yang menunjukkan semangat kerja sama yang produktif dengan merawat hubungan kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan agar melahirkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Dalam hal pemberantasan korupsi, sinergi merupakan kata kunci. Mengapa? Sebagai *extraordinary crime*, korupsi harus diberantas dengan *extraordinary effort* pula. Ketika para koruptor berkomplot merancang modus yang semakin canggih, kita juga harus bergandengan tangan dalam menindak dan mencegah rasuah, sekaligus menebarkan edukasi dan kampanye antikorupsi. Jurus pertahanan tiga lapis (*three lines of defense*) yang dirumuskan oleh penggawa kepatuhan internal Kemenkeu, dalam hal ini Inspektorat Jenderal, harus ditegakkan dengan konsisten. Hal ini demi menjaga kepercayaan publik kepada kita, selaku pengawal keuangan negara alias Nagara Dana Rakca.

Di samping menjaga integritas, reputasi organisasi perlu dirawat dengan memberikan pembuktian kepada masyarakat bahwa kita senantiasa memberikan kinerja terbaik. Hingga November 2023 lalu, kinerja pengelolaan #UangKita sesuai dengan jalurnya. Kita mampu membukukan pendapatan negara Rp2.462,37 triliun

atau 99,97 persen dari target penerimaan, atau tumbuh 3,57 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Hal ini disokong dari Rp1.671,37 triliun penerimaan pajak (97,28 persen dari target), Rp244,97 triliun penerimaan kepabeanan dan cukai (80,80 persen dari target), serta PNBP senilai Rp544,21 triliun (123,29 persen dari target).

Belanja negara juga terkawal dengan baik, yakni sebesar Rp2.510,54 triliun atau 80,53 persen dari pagu. Angka tersebut terdiri atas Rp1.774,44 triliun dari belanja pemerintah pusat dan Rp736,10 triliun TKD.

Menilik kinerja keuangan tersebut, optimisme masyarakat masih terjaga cukup tinggi. Aktivitas konsumsi masih terjaga dengan baik, dan aktivitas produksi juga cukup kuat.

Tantangan perekonomian pada tahun depan harus kita antisipasi agar manfaat #UangKita makin terasa di masyarakat. Presiden Joko Widodo telah menyerahkan DIPA dan alokasi TKD tahun anggaran 2024, pada hari Rabu, 29 November 2023. Artinya, mulai awal tahun pada 1 Januari 2024 nanti, #UangKita sudah siap dimanfaatkan bagi masyarakat. Pada tahun ini, APBN bekerja keras dalam mewujudkan konsolidasi fiskal,



di tengah ketidakpastian global. Hal ini supaya Indonesia mampu lolos dari bekapan pandemi sehingga tumbuh lebih kuat, dan memberikan fondasi yang makin kokoh untuk tahun depan. Pada 2024, APBN ditargetkan untuk menjamin ketersediaan belanja Rp3.325,1 triliun, yang di antaranya dialokasikan Rp857,6 triliun untuk TKD. Hal ini supaya manfaat #UangKita dapat dirasakan rakyat hingga ke pelosok daerah, antara lain melalui pengentasan kemiskinan, pencegahan gizi buruk yang mengakibatkan balita tengkes (*stunting*), mendukung operasional sekolah, meningkatkan layanan publik di daerah, menangani kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga memberikan empat poin arahan. Pertama, agar anggaran harus digunakan

dengan disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Kedua, anggaran harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Ketiga, penyerapan anggaran perlu diakselerasi. Dan keempat, kita harus mampu menyesuaikan diri terhadap ketidakpastian, dengan tetap berfokus kepada hasil.

Kenali Modus Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai

Jakarta, 11-12-2023 – Perkembangan industri *e-commerce* merupakan salah satu roda penggerak ekonomi digital di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tingginya perilaku masyarakat selaku konsumen yang menggunakan layanan *e-commerce* sebagai media berbelanja *online*.

Berdasarkan Laporan Perilaku Konsumen *e-commerce* Indonesia 2023 yang dipublikasikan Kredivo dan Katadata *Insight*, festival belanja *online* masih menarik minat banyak konsumen. Data menunjukkan volume transaksi

tertinggi terjadi saat festival belanja *online* yang terjadi pada 12 Desember (12.12) dan 11 November (11.11), dengan peningkatan transaksi hingga dua kali lipat dibandingkan rata-rata transaksi harian.

“Seiring tingginya volume transaksi pada festival belanja *online*, masyarakat juga patut mewaspadaai modus penipuan yang terjadi melalui *online shop* (olshop). Khususnya penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai,” ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar.

Berdasarkan data pengaduan penipuan mengatasnamakan



Bea Cukai yang diperoleh dari seluruh saluran layanan informasi Bea Cukai pada Oktober 2023, terdapat 393 laporan pengaduan dengan modus penipuan tertinggi melalui olshop. Modus olshop menduduki posisi pertama dengan persentase mencapai 49 persen dan total kerugian yang dialami mencapai 47 persen dari total pengaduan pada Januari hingga Oktober 2023.

Encep mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam melakukan transaksi pada layanan *e-commerce* terutama terhadap harga yang tidak wajar. Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi apabila tidak

bertransaksi langsung pada layanan *e-commerce*, seperti laman web beacukai.go.id/ barangkiriman untuk mengecek status dan tagihan barang kiriman, laman cekrekening.id untuk mengecek kebenaran rekening, dan aplikasi *get contact* untuk mengecek kontak penjual bukanlah kontak penipu.

“Modus yang dilakukan pelaku penipuan adalah manipulasi psikologis. Lewat cara ini pelaku meminta korban agar bersedia mengirim sejumlah uang ke rekening pelaku dalam batas waktu tertentu. Pelaku menebar ancaman dan memanfaatkan ketakutan korban untuk mendapatkan uang,” ujar Encep.

Encep mengatakan bahwa pajak dalam rangka impor (PDRI) hanya dikenakan untuk barang impor dan pembayarannya menggunakan kode *billing* yang masuk ke rekening negara dan tidak dilakukan melalui rekening pribadi.

“Jangan ragu memutuskan kontak penipu dan melaporkan indikasi penipuan ke kanal komunikasi Bea Cukai di *contact center* Bea Cukai 1500225 atau media sosial resmi Bea Cukai. Apabila sudah telanjur terjadi penipuan, dapat melaporkan ke Polri melalui laman patrolisiber.id atau datang langsung ke kantor polisi,” pungkas Encep.

Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Bea Cukai Jalin Kerja Sama Perdagangan dengan UEA

Jakarta, 29-11-2023 – Sebagai *trade facilitator*, Bea Cukai memiliki peran untuk mengawasi, melayani, dan memfasilitasi perdagangan internasional. Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam memfasilitasi perdagangan internasional berupa *Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator* (MRA AEO) dengan United Arab Emirates (UAE).

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, mengungkapkan bahwa MRA AEO Indonesia dengan UAE merupakan kesepakatan

pengakuan timbal balik antara administrasi kepabeanan Indonesia dan UAE tentang program-program AEO agar dapat diakui dan diterima di tiap-tiap negara.

“Melalui MRA AEO, kedua negara (Indonesia-UAE) sepakat untuk bersama-sama memfasilitasi perdagangan internasional di antara kedua negara, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Kesepakatan kedua negara merupakan perjalanan panjang yang dimulai dari 2019 hingga akhirnya diimplementasikan pada 11 November 2023. Penandatanganan perjanjian MRA AEO telah dilakukan oleh Menteri Keuangan RI dan Menteri Perekonomian UAE



pada 24 Juli 2019. Kemudian dilanjutkan penandatanganan *Joint Action* pada Agustus 2020. Pada April 2021, kedua negara melakukan pertukaran informasi tentang program AEO tiap-tiap administrasi pabean. Setelah itu, kedua negara melakukan *Joint Validation*, yaitu penilaian terkait otorisasi dan validasi kriteria AEO yang dijalankan di kedua negara. Kegiatan ini dilaksanakan di UAE, pada September 2022, dan di Indonesia, pada Oktober 2022.

“Indonesia dan UAE sepakat menandatangani kerja sama MRA AEO pada November 2022 dan melakukan *piloting* pada Juni sampai September 2023, hingga akhirnya

diimplementasikan secara penuh pada 11 November 2023,” ujar Encep.

Encep mengungkapkan kesepakatan MRA AEO memberikan beragam manfaat perdagangan bagi Indonesia. Bagi importir, baik yang berstatus AEO maupun non-AEO, yang akan mengimpor barang yang berasal dari perusahaan AEO di UAE akan mendapatkan percepatan proses *customs clearance* pada saat pemberitahuan impor barang BC 2.0 di Indonesia. Percepatan proses *customs clearance* juga berlaku bagi eksportir AEO yang akan mengekspor barang ke UAE.

“Implementasi MRA AEO diharapkan dapat mendukung

efisiensi waktu dan biaya logistik, serta pertumbuhan ekonomi pada kedua negara. Bea Cukai juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang baik melalui implementasi MRA AEO,” ujar Encep.

Pemerintah melalui Bea Cukai menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pelaku usaha atas dukungannya dengan mematuhi peraturan di bidang impor dan ekspor, sehingga dapat berdampak baik dengan terciptanya lingkungan perdagangan yang kondusif di Indonesia.

“Semoga momen ini menjadi salah satu langkah baik Bea Cukai dalam mendukung pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional,” pungkas Encep.

The 12th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED)

***“THE FRAGMENTED WORLD: RECALIBRATING
DEVELOPMENT STRATEGIES”***
Bali, 6-7 Desember 2023

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menggelar *Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED)* 2023 di Bali pada 6-7 Desember 2023. Tahun ini topik yang dibahas adalah ‘*The Fragmented World: Recalibrating Development Strategies*’.

Dalam *keynote speech*, Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa perlu mengkalibrasi ulang strategi pembangunan agar sesuai dengan lanskap global yang berubah, juga

untuk melakukan perbaikan terus-menerus dan monitoring terhadap agenda Pembangunan yang telah atau belum kita capai. Saat ini Indonesia perlu untuk mengkalibrasi ulang dan memperbarui strategi pembangunan dalam kondisi global yang berkembang pesat pascaCovid-19, di ketegangan geopolitik yang meningkat, transisi menuju ekonomi ramah lingkungan, dan kemajuan teknologi yang pesat.

Penyelenggaraan AIFED ke 12 ini menggarisbawahi komitmen untuk Indonesia dalam mengantisipasi pergeseran kekuatan global dan meningkatkan peran



Indonesia dalam mengatasi berbagai tantangan global. Secara keseluruhan, AIFED ke 12 memberikan masukan berharga terkait dengan: 1) kekuatan pendorong di balik tren globalisasi saat ini dan masa depan; 2) implikasi fragmentasi geoekonomi, dan 3) perdagangan, investasi, dan kebijakan manusia yang optimal dalam lanskap dunia yang terus berubah dan siklus inovasi yang dinamis.

AIFED ke 12 di 2023 dihadiri oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Vice President East and Southeast Asia, and the Pacific Asian Development Bank (ADB), serta Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams yang menyampaikan sambutan secara *virtual*.

Peran Serta Indonesia dalam Bantuan Kemanusiaan Palestina

Dunia sedang berduka. Penyebabnya, eskalasi perang di Timur Tengah tak kunjung membaik hari demi hari. Melansir CNBC, tercatat 17 ribu korban jiwa telah berjatuhan dalam waktu dua bulan, terhitung mulai 8 Oktober s.d. 8 Desember 2023. Merespon hal ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk turut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagaimana tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD

1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Indonesia secara konsisten telah menunjukkan dukungannya kepada Palestina, salah satunya didasarkan pada solidaritas sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan. Sejak tahun 1947, Indonesia telah mendukung dan mengakui kemerdekaan Palestina dengan tindakan nyata,



seperti pendirian Kedutaan Besar di Amman, Yordania, yang mewakili Palestina, dan sebaliknya, pembangunan Kedutaan Palestina di Jakarta. Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Indonesia juga aktif berperan dalam upaya diplomasi internasional untuk mencapai solusi dua negara (*two state solution*) dalam konflik Israel-Palestina. Solusi ini bertujuan untuk memungkinkan masyarakat Israel dan Palestina hidup berdampingan sambil menghormati hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi dan hukum.

Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk mendukung proses perdamaian, antara lain dengan menyediakan personil

dan pasukan untuk misi perdamaian PBB di Timur Tengah, termasuk *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), yang bertujuan menjaga perdamaian di Lebanon Selatan. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan konflik Israel-Palestina, partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian ini memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas regional. Selain itu, Indonesia juga memberikan bantuan kemanusiaan berbagai jenis kepada rakyat Palestina yang terdampak konflik, termasuk bantuan medis, makanan, dan dukungan keuangan untuk proyek-proyek infrastruktur penting di Palestina, seperti rumah sakit dan fasilitas penting lainnya.

Pada November lalu, Pemerintah Indonesia mengirimkan sebanyak dua kali bantuan kemanusiaan ke Palestina, yang secara resmi dilepas Presiden pada 4 dan 20 November 2023 di Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Halim Perdanakusuma. Bantuan tersebut berasal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, lembaga swadaya, dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang dikoordinasikan oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam mengoordinasikan pengiriman bantuan ini sangat krusial mengingat akses masuk bantuan ke Palestina memang tidak mudah.

Bantuan pertama, berupa bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang-barang logistik lainnya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Gaza dengan total berat mencapai 51,5 ton. Sementara bantuan kedua, dengan total berat mencapai 21,7 ton, terdiri atas bantuan pemerintah sebanyak 3,3 yang terdiri dari obat-obatan dan perlengkapan kesehatan, dan bantuan dari masyarakat Indonesia sebanyak 18,4 ton yang terdiri dari makanan kaleng, matras,

selimut, *hygiene kit* (dewasa dan anak), makanan siap saji dan perlengkapan lain.

Bantuan kemanusiaan kepada Palestina yang dikirimkan oleh pemerintah pada tahap kedua, di antaranya merupakan bantuan yang berasal dari Indonesia AID (Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional/LDKPI) yang dikirimkan melalui kerja sama dengan *United Nations Relief & Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) dan *Egyptian Red Crescent* (ERC). LDKPI merupakan sebuah unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana kerja sama Pembangunan internasional (*Endowment Fund*) kepada negara atau Lembaga asing dalam rangka kerja sama pembangunan internasional. Dalam hal ini, LDKPI mengirimkan bantuan senilai Rp31,9 Miliar atau setara dengan USD 2 Juta yang berupa kebutuhan medis yang diperlukan masyarakat Palestina seperti obat-obatan dan peralatan medis (*hospital sundries*). Sebelumnya, pada tahun 2022 pemerintah melalui LDKPI juga menyampaikan bantuan untuk penanganan Covid-19

kepada Pemerintah Palestina dan bantuan kemanusiaan di wilayah pendudukan melalui *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dengan total sebesar Rp 14,4 M. Hal ini menunjukkan bahwa APBN, selain berperan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan nasional bangsa, yaitu turut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi.

Peran serta Indonesia dalam mendukung Palestina tak lepas dari sinergi dan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah yang berasal dari Lintas Kementerian dan Lembaga, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi, dan masyarakat. Diharapkan kerja sama yang baik ini dapat meningkatkan efektifitas politik luar negeri Indonesia, meningkatkan Indonesia sebagai negara yang besar yang bermartabat dan memiliki peran dan pengaruh positif di dunia.



Satu Bulan Menjelang
Tutup Tahun 2023,
Penerimaan Pajak
Mencapai 97,28 Persen
dari Target

Penerimaan Perpajakan

Tepat pada 30 November 2023, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil mencapai kinerja 97,28 persen dari Target. Capaian yang hampir mendekati sasaran tersebut, ditopang oleh kondisi perekonomian Indonesia yang kuat sampai dengan triwulan III 2023. Selain itu, penerimaan periode ini yang tinggi juga merupakan fenomena dari penurunan restitusi. Dari sisi pertumbuhan kumulatif, kinerja penerimaan mencapai 6,53 persen (yoy), naik sedikit dari kinerja bulan sebelumnya 5,33 persen (yoy).

Jika dielaborasi berdasarkan kelompok pajak, kinerja penerimaan mayoritas pajak masih unggul, dengan pengecualian kelompok PPh Migas. Kinerja PPh Migas berkontraksi akibat dari moderasi harga minyak bumi dan gas alam. Meskipun kinerja kelompok PPh Migas tertekan, kinerja kelompok lainnya tercatat stabil dan cenderung meningkat. Kinerja tertinggi yang mencapai *double digits* diraih oleh kelompok PBB dan Pajak Lainnya. Selaras dengan kinerja yang positif dari kedua kelompok pajak tersebut,

Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan YoY Kumulatif 2022 dan 2023



kelompok PPh Nonmigas dan pajak atas konsumsi juga tercatat impresif pada periode ini.

Kinerja Penerimaan Per Jenis Pajak

Sampai dengan 30 November 2023, mayoritas kinerja kumulatif dan bulanan pada jenis pajak utama membukukan pertumbuhan positif. Pajak atas konsumsi atau PPN DN secara kumulatif tumbuh 17,11 persen (yoy). Bahkan, kinerja bulanan jenis pajak dengan kontribusi terbesar ini, mencatatkan *extraordinary growth* 104,14 persen (yoy). Kenaikan yang tinggi pada PPN DN merupakan imbas penurunan restitusi pada sektor perdagangan bahan bakar minyak.

Beriringan dengan PPN DN, PPh Badan juga membukukan pertumbuhan kumulatif yang kuat 15,72 persen (yoy). Namun, secara bulanan jenis pajak ini tercatat tertekan. Kontraksi yang terjadi pada PPh Badan merupakan dampak dari dinamisasi PPh sektor pertambangan batubara dan jasa keuangan yang tidak berulang. Berbanding terbalik dengan PPN DN dan PPh Badan, PPh Pasal 21 konsisten tumbuh *double digits* secara kumulatif maupun bulanan. Pertumbuhan PPh Pasal 21 yang terjaga merupakan indikasi perbaikan pembayaran gaji dan upah tenaga kerja.

Pajak-pajak yang terkait dengan impor seperti PPN Impor, PPh Pasal 22 Impor, dan PPnBM Impor menunjukkan perbaikan kinerja dibandingkan

Realisasi Penerimaan Pajak 2023

Uraian	Target 2023 (Triliun)	Realisasi s.d. 30 November 2023		
		Rp (Triliun)	$\Delta\%$ '22-'23	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	935.07	968.14	4.68	103.54
- Non Migas	873.63	904.11	6.10	103.49
- Migas	61.44	64.04	-11.95	104.23
PPN & PPnBM	742.95	667.78	8.41	89.88
PBB	31.31	26.45	24.04	84.48
Pajak Lainnya	8.70	9.00	33.10	103.47
Jumlah	1.718.03	1.671.37	6.53	97.28

dengan periode sebelumnya. Namun demikian, kinerja pajak atas impor periode ini masih berkontraksi, kecuali pada PPnBM Impor yang selalu berkinerja positif sejak Januari 2023.

Jenis pajak PPh Final pada periode sampai dengan 30 November 2023 berkontraksi cukup dalam. Namun secara bulanan, kinerja jenis pajak ini tumbuh 26,29 persen (yoy). Tren lonjakan penerimaan PPh Final didominasi oleh peningkatan setoran PPh atas bunga deposito. Fenomena tersebut merupakan konsekuensi Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga 7-day (*Reverse*) *Repo Rate*.

Terakhir, kinerja jenis pajak PPh Pasal 26 dan PPh OP juga menggembirakan. Kedua jenis pajak tersebut membukukan pertumbuhan masing-masing 20,52 persen (yoy) dan 4,04 persen (yoy). Selaras dengan pertumbuhan kumulatif, kinerja November 2023 pada

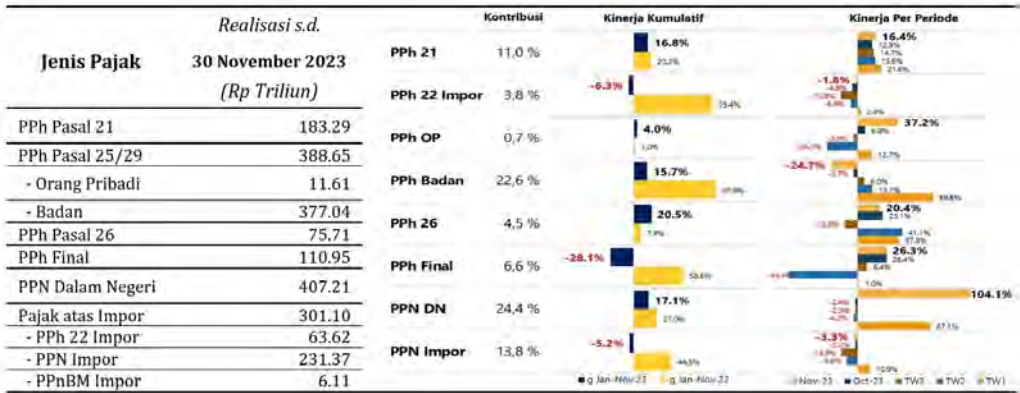
kedua jenis pajak tersebut juga menunjukkan tren yang meningkat. Pada PPh Pasal 26, pertumbuhan November 2023 didominasi oleh pembayaran PPh atas bunga keluar negeri. Sementara itu, kinerja bulanan PPh OP ditopang oleh setoran PPh tahun pajak sebelum 2023.

Kinerja Penerimaan Per Sektor

Dari sisi sektoral, seluruh sektor utama membukukan pertumbuhan kumulatif positif. Namun demikian, Sektor Pertambangan dan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi berkontraksi pada November 2023. Secara umum, kontraksi tersebut dipengaruhi oleh dinamisasi PPh Badan yang tidak berulang.

Pada periode ini, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan menjadi penopang utama pajak sektoral. Kedua sektor tersebut menyumbang lebih dari 50

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama



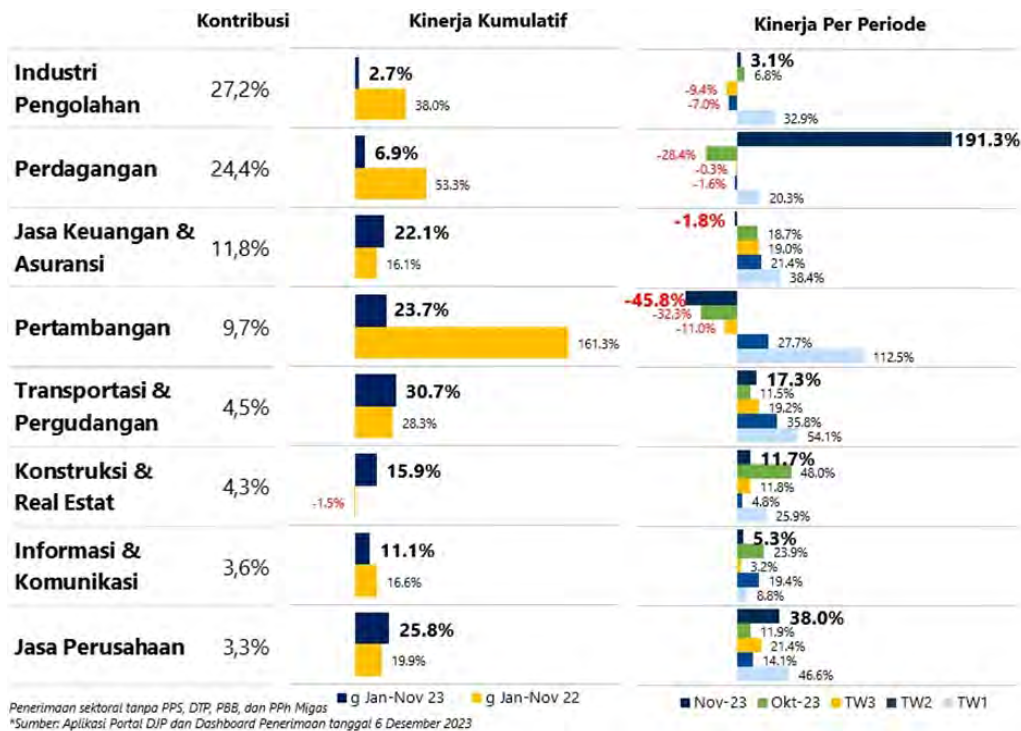
persen total penerimaan pajak. Khusus untuk Sektor Perdagangan, pertumbuhan bulanan mencapai 191,31 persen (yoy). Capaian yang luar biasa tersebut merupakan efek dari penurunan restitusi yang signifikan pada subsektor perdagangan bahan bakar minyak. Selaras dengan Sektor Perdagangan, kinerja Sektor Industri Pengolahan juga positif. Peningkatan pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan juga dipengaruhi oleh penurunan restitusi, terutama pada Subsektor industri makanan.

Kinerja Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi melemah pada November 2023. Tekanan pada sektor ini merupakan imbas dari fenomena dinamisasi pembayaran pajak di Sektor Perbankan yang tidak berulang kembali. Selaras dengan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor

Pertambangan juga terpuruk pada periode ini. Namun, efek tekanan yang dialami oleh sektor Pertambangan lebih dalam dari periode sebelumnya. Penyebab utama dari penurunan Sektor Pertambangan yaitu dinamisasi PPh Badan Subsektor pertambangan batubara tidak berulang.

Selanjutnya, Sektor Transportasi dan Pergudangan, serta Sektor Konstruksi dan Real Estate konsisten mempertahankan kinerja positif hingga periode ini. Pada Sektor Transportasi dan Pergudangan, kinerja bulanan ditopang oleh angkutan laut domestik untuk barang dan jasa penunjang angkutan. Sementara itu, capaian dari Sektor Konstruksi dan Real Estate merupakan efek penurunan restitusi pada konstruksi bangunan sipil.

Penerimaan Pajak Sektoral



Terakhir, kedua sektor dengan kontribusi penerimaan pajak terkecil yaitu sektor Informasi dan Komunikasi dan Sektor Jasa Perusahaan juga berkinerja positif pada November 2023. Pertumbuhan kedua sektor tersebut masing-masing 5,33 persen (yoy) dan 38,05 persen (yoy). Pada Sektor Informasi dan Komunikasi, pertumbuhan sudah mencapai titik normal setelah sebelumnya tumbuh tinggi 23,95 persen (yoy).

Senada dengan sektor Informasi dan Komunikasi, pertumbuhan Sektor Jasa Perusahaan juga bertahan di

zona hijau sejak awal 2023. Capaian bulanan Sektor Jasa Perusahaan 38,05 persen (yoy), meningkat jauh dari bulan lalu. Performa yang baik dari sektor Jasa Perusahaan dipengaruhi oleh penurunan restitusi jasa arsitektur dan teknik sipil.

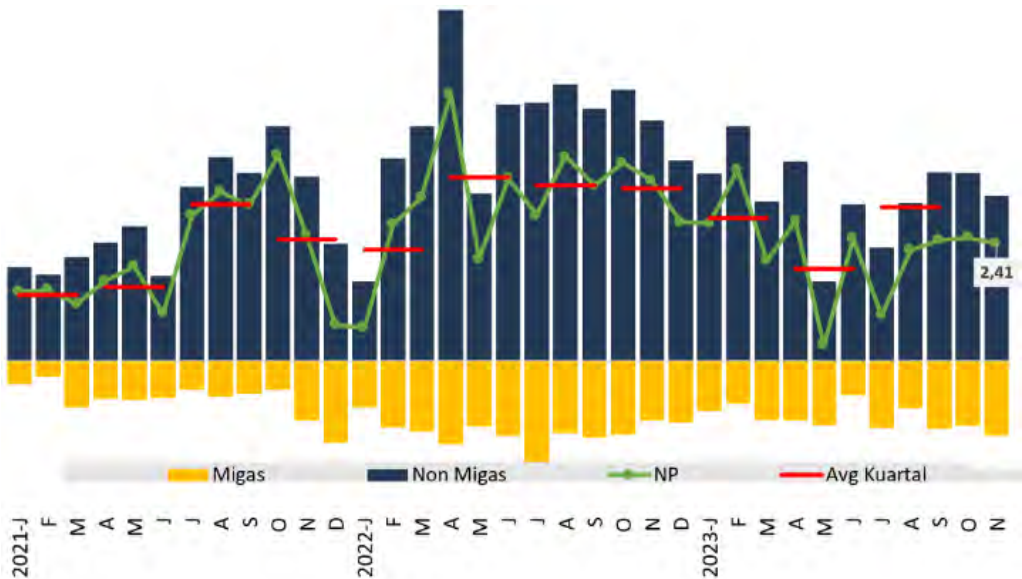
Neraca Perdagangan
Nasional November
2023 Tercatat Surplus
USD2,41 Miliar

Kepabeanaan dan Cukai

Pada November 2023, Neraca Perdagangan Indonesia menunjukkan kinerja yang memuaskan dengan mencatatkan surplus USD2,41 miliar. Surplus ini melanjutkan rentetan kinerja positif yang telah terjadi lebih dari tiga tahun sejak Mei 2020, dan merupakan kabar baik bagi perekonomian Indonesia. Dengan demikian, secara total, Neraca Perdagangan Indonesia hingga 30 November 2023 mencapai surplus USD33,63 miliar.

Surplus terjadi terutama pada neraca non-Migas, yang menandakan performa positif dalam ekspor komoditas SDA seperti batubara, termasuk lignit, dan minyak goreng. Selain itu, sektor manufaktur seperti olahan logam, pakaian, dan kendaraan juga memberikan kontribusi penting dalam menciptakan surplus tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa neraca Migas masih mencatatkan defisit, terutama disebabkan oleh impor bahan bakar dan minyak bumi.

Neraca Perdagangan 2020-2023



Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi dampak dari normalisasi harga yang telah terlihat pada kinerja perdagangan Indonesia. Normalisasi harga ini mencerminkan penyesuaian harga komoditas global yang berpengaruh pada ekspor dan impor negara. Salah satu tanda dampak normalisasi harga tersebut berupa penurunan kinerja ekspor dan impor secara akumulatif.

Perubahan harga komoditas global berdampak pada permintaan dan daya saing ekspor, serta keputusan impor di suatu negara. Meskipun penurunan ini dapat mengindikasikan beberapa tantangan dalam perdagangan, hal ini juga mencerminkan adaptasi terhadap dinamika pasar global.

Pada November 2023, kinerja ekspor turun 8,56 persen (yoy), penurunan kinerja terjadi pada sektor non-Migas namun tumbuh pada sektor Migas. Kinerja sektor non-Migas menurun, kali ini mencapai 8,7 persen (yoy). Penurunan yang paling signifikan terjadi pada ekspor minyak goreng kelapa sawit dan batubara jenis lignit, masing-masing turun 12,2 persen dan 34,1 persen. Sedangkan pada Sektor Migas mengalami pertumbuhan ekspor 16,4 persen (yoy), yang didorong oleh kenaikan ekspor minyak bakar dan minyak bumi.

Sementara itu, kinerja impor juga menunjukkan peningkatan 3,29 persen (yoy) pada November 2023 terutama

Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2022	2023	2022	2023	
1	BEA MASUK	47,53	45,79	45,85	33,22%	0,15%	96,47%
2	CUKAI	245,45	195,74	187,43	16,86%	-4,25%	76,36%
	Hasil Tembakau	232,59	188,44	179,99	16,54%	-4,49%	77,39%
	Ethil Alkohol	0,14	0,12	0,11	12,87%	-1,13%	83,86%
	MMEA	8,67	7,12	7,21	26,69%	1,25%	83,22%
	Denda Adm. Cukai	-	0,04	0,10	-34,20%	128,73%	-
	Cukai Lainnya	-	0,02	0,02	-6,50%	-19,75%	-
	Plastik & MBDK	4,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3	BEA KELUAR	10,21	38,69	11,68	27,34%	-69,80%	114,41%
	TOTAL	303,19	280,22	244,97	20,65%	-12,58%	80,80%
	PPN Impor		244,07	231,37	44,50%	-5,21%	
	PPn BM Impor		4,44	6,11	44,95%	37,72%	
	PPh Pasal 22 Impor		67,92	63,62	93,42%	-6,33%	
	Total PDRI lainnya		316,43	301,10	52,80%	-4,85%	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		596,65	546,07	35,81%	-8,48%	

Sumber: DJPB 5 Desember 2023

dari sektor Migas, sedangkan sektor nonMigas berkontraksi. Impor nonMigas menurun 0,37 persen (yoy) yang disebabkan oleh penurunan impor besi dan baja dasar, bahan baku plastik, mesin penambangan dan komponen elektronik. Impor Migas tumbuh 24,41 persen (yoy) didorong oleh kenaikan seluruh komoditas kecuali minyak pelumas.

REALISASI PENERIMAAN KEPABEANAAN DAN CUKAI

Hingga 30 November 2023, realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai mencapai Rp244,97 triliun atau 80,80 persen dari target. Penerimaan total berkontraksi

12,58 persen (yoy) meskipun Penerimaan BM masih tumbuh. Penurunan pada bulan ini terjadi pada Penerimaan BK akibat harga CPO yang sudah termoderasi dan penurunan volume ekspor komoditas mineral serta penurunan Penerimaan Cukai yang disebabkan oleh penyusutan produksi HT.

Realisasi Penerimaan PDRI lainnya mencapai Rp301,10 triliun atau turun 4,85 persen (yoy). Sehingga Penerimaan Negara yang telah dikumpulkan dari Kepabeanaan dan Cukai serta PDRI lainnya mencapai Rp546,07 triliun atau turun 8,48 persen (yoy).

Dari sisi Penerimaan BM, kinerja positif masih berlanjut dengan capaian 96,47 persen dari target

atau tumbuh 0,15 persen (yoy) menjadi Rp45,85 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh apresiasi kurs USD dan kenaikan tarif rata-rata BM dibandingkan periode yang sama pada 2022. Kinerja ini juga turut dipengaruhi oleh komoditas kontributor BM terbesar yang masih tumbuh di antaranya, kendaraan dan suku cadangnya, gas alam, serta mesin penambangan.

Penerimaan BK mencapai Rp11,68 triliun atau 114,41 persen dari target. Kinerja BK tersebut menurun signifikan 69,80 persen (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh harga CPO yang lebih rendah dan pengurangan volume ekspor mineral. Penerimaan BK dari kelapa sawit turun 81,44 persen (yoy), mengikuti harga referensi CPO yang turun. Rata-rata harga referensi CPO Januari s.d. 30 November 2023 mencapai USD837/MT, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama 2022, USD1165/MT. Kemudian BK tembaga melambat 5,42 persen (yoy), yang diakibatkan oleh penurunan volume ekspor. Penurunan juga terjadi pada BK bauksit yang berkontraksi 88,49 persen (yoy) akibat pelarangan ekspor bauksit.

Cukai merupakan mesin utama Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, yang mencapai

Rp187,43 triliun atau 76,36 persen dari target. Kinerja penerimaan ini menunjukkan penurunan 4,25 persen (yoy). Penurunan penerimaan Cukai terjadi pada HT dan Etil Alkohol (EA).

Penerimaan CHT berkontraksi 4,49 persen (yoy) menjadi Rp179,99 triliun atau 77,39 persen dari target. Penurunan Kinerja tersebut disebabkan oleh pemesanan pita cukai dan realisasi tarif yang rendah. Hal ini terlihat dari penurunan produksi 2,4 persen (yoy) s.d. September 2023 dan realisasi tarif yang turun 0,5 persen (yoy), lebih rendah dari kenaikan tarif normatif 10 persen. Realisasi tarif yang rendah tersebut disebabkan oleh produksi SKM dan SPM golongan 1 yang memiliki tarif tinggi terus mengalami penurunan lebih dalam dibandingkan jenis lainnya.

Penerimaan Cukai didorong untuk tetap optimal, namun demikian produksi batang rokok harus dikendalikan. Hal ini sejalan dengan fungsi Cukai untuk membatasi peredaran barang tertentu. Berdasarkan kebijakan tarif Cukai HT 2023, dengan rata-rata tertimbang kenaikan tarif Cukai HT 10 persen, produksi sigaret 2023 diproyeksikan tetap menurun. Produksi HT hingga November tercatat turun 1,4 persen

(yoy), menandakan fungsi pengendalian berjalan dengan baik.

Penerimaan Cukai MMEA naik 1,25 persen (yoy) menjadi Rp7,21 triliun, atau mencapai 83,22 persen dari target. Kenaikan ini didorong oleh produksi yang kembali tumbuh 1,15 persen (yoy).

Sementara itu, kinerja Penerimaan Cukai EA turun 1,13 persen (yoy) menjadi Rp114,88 miliar atau 83,86 persen dari target. Penurunan tersebut dikarenakan oleh penurunan produksi bayar 1,1 persen dan secara total produksi EA turun 5,57 persen. Dilihat dari nilai penerimaannya, sebenarnya kinerja Cukai EA berada pada pola normal. Sebagai informasi tambahan, sepanjang 2022 penerimaan rata-rata Cukai EA Rp10 miliar per bulan.

Penerimaan
Negara Bukan
Pajak

Royalti Nikel Tumbuh 26,7
Persen (yoy) Menyaingi
Kontribusi Royalti Batubara
Menyumbang PNPB



Penerimaan Negara Bukan Pajak

Capaian PNBP hingga 30 November 2023 menunjukkan kinerja positif.

Harga komoditas di pasaran termoderasi dan inflasi global mulai melandai, memengaruhi kinerja PNBP November 2023. Secara keseluruhan, tren realisasi PNBP November 2023 meningkat dibandingkan Oktober 2023

Realisasi PNBP tercatat Rp544,11 triliun, 123,27 persen dari target, atau tumbuh 3,20 persen (yoy). Kinerja Pendapatan Pertambangan

Minerba, Pendapatan KND, dan Pendapatan BLU masih menjadi lokomotif utama dalam mendorong capaian PNBP. Meski harga komoditas energi menurun, upaya peningkatan PNBP melalui penyempurnaan regulasi dan perbaikan kinerja BUMN berdampak positif, menyumbang penerimaan negara.

Pendapatan SDA mencapai Rp235,90 triliun, 120,37 persen dari target atau terkontraksi 1,10 persen (yoy). Kontraksi tersebut disumbang penurunan

Realisasi PNBP sampai dengan 30 November 2023

PNBP (Miliar Rupiah)	APBN 2023	Realisasi s.d. 30 November 2023	% APBN	% Growth (YoY)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	441.391,81	544.110,77	123,27	3,20
A Pendapatan SDA	195.975,38	235.902,31	120,37	(1,10)
1 Migas	131.169,39	108.957,74	83,07	(19,93)
a Minyak Bumi	96.137,04	89.436,02	93,03	(17,72)
b Gas Bumi	35.032,35	19.521,72	55,72	-
2 Nonmigas	64.805,99	126.944,56	195,88	23,91
a Pendapatan Pertambangan Minerba	54.030,12	119.494,43	221,16	25,95
b Pendapatan Kehutanan	5.161,67	4.882,11	94,58	(1,35)
c Pendapatan Perikanan	3.500,00	490,10	14,00	(51,70)
d Pendapatan Panas Bumi	2.114,20	2.077,93	98,28	29,38
B Pendapatan KND	49.100,00	81.542,97	166,08	100,86
C Pendapatan PNBP Lainnya	113.300,04	146.574,73	129,37	(15,34)
a. Pendapatan Penjualan Hasil	31.209,95	39.008,12	124,99	(40,80)
b. Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	5.302,92	2.666,60	50,29	(73,51)
c. Pendapatan PNBP K/L	76.787,17	104.900,00	136,61	7,94
D Pendapatan BLU	83.016,39	80.090,77	96,48	6,80

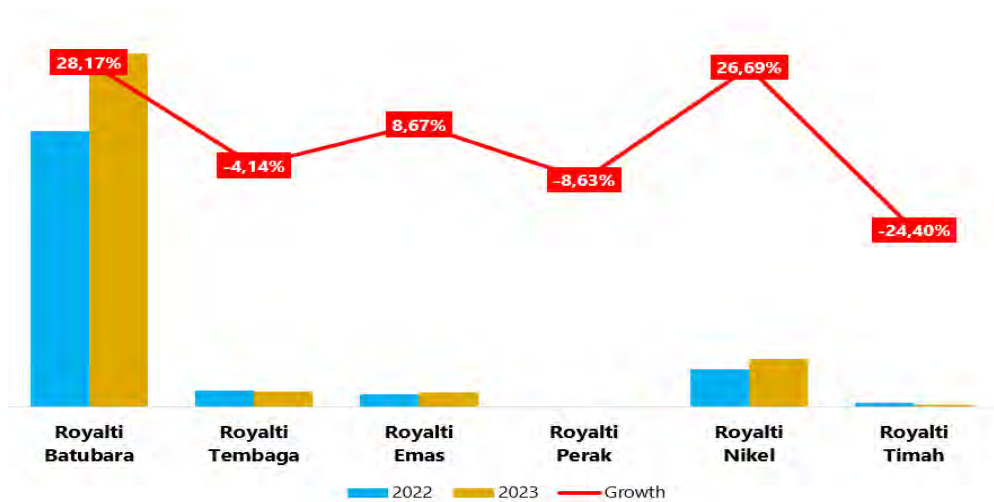
SDA Nonmigas yang terkontraksi 19,93 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan SDA Migas melambat dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh moderasi harga minyak mentah Indonesia (ICP). Harga minyak mentah dunia juga mengalami penurunan sebagai dampak risiko ketegangan geopolitik, tingkat inflasi, dan pelemahan ekonomi beberapa negara khususnya di Eropa. Selain itu, penurunan *lifting* minyak (dampak penurunan produksi alamiah sumur-sumur minyak, kebocoran pipa-pipa dll) merupakan faktor lain penyusutan pendapatan SDA

Migas. Pada periode Desember 2022 hingga November 2023, rata-rata ICP menurun 19,01 persen dan *lifting* minyak bumi melambat 1,98 persen.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas mencapai Rp126,94 triliun, 195,88 persen dari target atau tumbuh 23,91 persen (yoy). Realisasi capaian signifikan tersebut disumbang oleh sektor Pertambangan Minerba yang berkontribusi Rp119,49 triliun, 221,16 persen dari target atau tumbuh 25,95 persen (yoy). Kontributor utama sektor Pertambangan Minerba tersebut berasal dari peningkatan iuran produksi/royalti batubara. Pendapatan Negara Bukan Pajak dari royalti

Realisasi Royalti Minerba dan Batubara s.d 30 November 2023



batubara mencapai Rp92,47 triliun atau tumbuh 28,17 persen (yoy). Peningkatan tersebut dampak implementasi penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26/2022 yang mulai berlaku sejak September 2022.

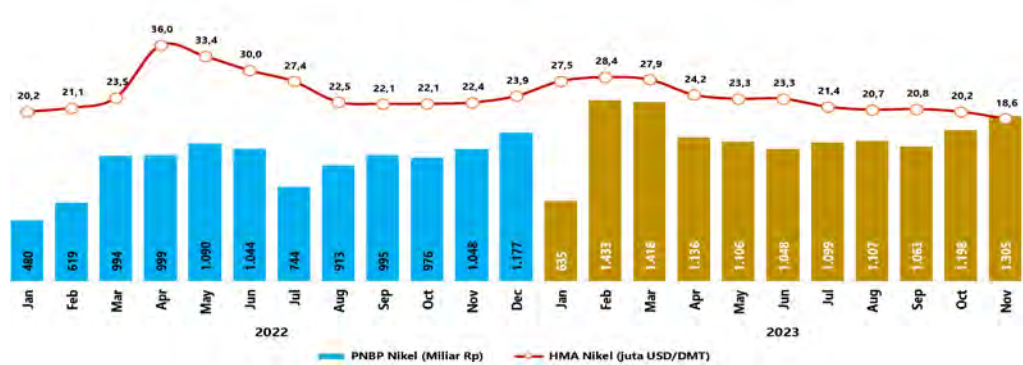
Rata-rata HBA periode Januari sampai dengan November 2023 terkontraksi 59,76 persen (yoy). Selanjutnya masih dalam periode yang sama, dari sisi volume penjualan batubara meningkat 10,47 persen (yoy). Meskipun di periode tersebut, rata-rata HBA melambat, kenaikan tarif royalti dan volume penjualan mampu menutupi penurunan tersebut.

Kontribusi royalti nikel juga cukup signifikan menyumbang PNBP. Tercatat hingga November 2023 telah menghasilkan PNBP Rp12,54 triliun atau tumbuh

26,69 persen (yoy). Realisasi ini mencapai 145,29 persen dari target. Pertumbuhan ini sedikit di bawah pertumbuhan royalti batubara. Nikel berpotensi menjadi pesaing batubara sebagai kontributor utama PNBP. Nikel merupakan primadona baru di tengah semakin masif transisi energi, dari energi fosil ke energi ramah lingkungan (seperti kendaraan listrik). Nikel menjadi komponen utama kendaraan listrik. Sebagai kabar baik, Indonesia yang memiliki cadangan nikel 21 juta metrik ton menjadi pemilik cadangan nikel terbesar di dunia.

Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan terkontraksi 1,35 persen (yoy). Penurunan ini antara lain disebabkan oleh jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkurang.

Perkembangan Realisasi Royalti Nikel 2022 - 2023



Sementara itu, sektor Perikanan berkontraksi 51,70 persen (yoy). Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan mekanisme pemungutan PNBPN Perikanan. Sebelumnya, digunakan metode perhitungan PNBPN Pungutan Hasil Perikanan (PHP) praproduksi, menjadi pascaproduksi. Perubahan mekanisme tersebut berdampak pada pembayaran, dari semula Wajib Bayar membayar PNBPN saat akan berlayar dan dihitung untuk perkiraan PNBPN 1 tahun menjadi pembayaran PNBPN dilakukan saat mendaratkan ikan. Namun demikian, berdasarkan realisasi bulanan periode Januari sampai dengan November 2023, penerimaan meningkat seiring pertambahan jumlah kapal perikanan yang memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) pascaproduksi dan saat ini sedang dalam musim penangkapan ikan.

Selanjutnya, sektor Panas Bumi tumbuh 29,38 persen (yoy).

Kenaikan tersebut terutama berasal dari tambahan Setoran Bagian Pemerintah (SBP) periode triwulan II 2023, yaitu penerimaan dari penjualan listrik PLTP Wayang Windu Unit I yang sebelumnya tertunda akibat perbedaan indeks eskalasi harga listrik.

Realisasi Pendapatan KND mencapai Rp81,54 triliun, 166,08 persen dari target atau tumbuh 100,86 persen (yoy). Perekonomian nasional yang pulih pada 2022 pascapandemi Covid-19 mendatangkan profit signifikan bagi BUMN, baik BUMN Perbankan maupun BUMN nonperbankan. Profit tersebut mendorong kenaikan Pendapatan KND yang disetor BUMN pada 2023. Kenaikan Pendapatan KND ini melampaui target Rp49,10 triliun.

Setoran dividen BUMN Perbankan (Himbara) Rp40,84 triliun menjadi penyumbang utama pendapatan KND. Selain karena kenaikan

laba bersih Himbara, kebijakan kenaikan *payout ratio* dividen juga menjadi faktor peningkatan setoran dividen.

Setoran dividen BUMN Nonperbankan tercatat Rp40,70 triliun. Kinerja BUMN Nonperbankan mencapai 167,87 persen dari target, atau tumbuh 154,11 persen (yoy). Capaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang berkontraksi 5,28 persen (yoy). Kenaikan tersebut antara lain berasal dari kinerja keuangan PT Pertamina, PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Pupuk Indonesia, PT. PLN, dan PT. Semen Indonesia yang semakin membaik pada tahun buku 2022.

Capaian realisasi PNBPN Lainnya mencapai Rp146,57 triliun, 129,37 persen dari target atau turun 15,34 persen (yoy). Komponen Pendapatan PNBPN Kementerian/ Lembaga (K/L) pada beberapa K/L tumbuh 7,94 persen (yoy). Namun, Pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) berkontraksi 40,80 persen (yoy). Pendapatan Minyak Mentah (DMO) juga berkontraksi 73,51 persen (yoy).

Pendapatan PNBPN K/L mencapai Rp104,90 triliun, 136,61 persen dari target atau tumbuh 7,94 persen (yoy). Kenaikan ini terutama berasal dari pendapatan Layanan K/L yang disumbang antara lain dari Pendapatan Kejaksaan dan

Peradilan serta hasil tipikor dan Pendapatan Layanan Administrasi Hukum (seperti visa, paspor, izin imigrasi, dll.), serta pendapatan dari jasa transportasi, terutama layanan perkeretaapian, penerbangan, dan kepelabuhan.

Selanjutnya, realisasi Pendapatan PHT mencapai Rp39,01 triliun atau 124,99 persen dari target atau berkontraksi 40,80 persen (yoy). Penurunan realisasi tersebut disebabkan oleh pendapatan yang tidak berulang di tahun 2022, yaitu dengan berlakunya PP Nomor 15/2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBPN di bidang Pengusahaan Kegiatan Usaha Batubara.

Pendapatan Badan Layanan Umum mencapai Rp80,09 triliun, 96,48 persen dari target atau tumbuh 6,80 persen (yoy). Sementara itu, Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kepala Sawit mencapai Rp34,43 triliun atau turun 9,36 persen (yoy). Pendapatan BLU NonKelapa Sawit mencapai Rp48,59 triliun atau tumbuh 17,71 persen (yoy), yang disumbang antara lain oleh Jasa Pelayanan Rumah Sakit di beberapa K/L dan pendapatan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, serta pendapatan jasa layanan perbankan pada beberapa satker BLU di Kementerian Keuangan.

Belanja
Pemerintah
Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah
Pusat (BPP) terutama untuk
Mendorong Pertumbuhan
Ekonomi dan Kesejahteraan
Masyarakat

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi BPP mencapai Rp1.774,44 triliun, 78,99 persen dari pagu, atau terkontraksi 5,73 persen (yoy). Realisasi BPP tersebut dimanfaatkan untuk pelaksanaan program di bidang perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, serta pertahanan dan keamanan. Selain itu, realisasi BPP juga digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai termasuk pembayaran manfaat pensiun serta pembayaran kewajiban Pemerintah dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat seperti subsidi dan kompensasi

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp890,18 triliun atau 88,94 persen dari pagu. Realisasi Belanja K/L terutama dipengaruhi oleh pelaksanaan berbagai kegiatan K/L seperti dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu, pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan infrastruktur prioritas, serta penyaluran berbagai bansos seperti PKH, Kartu Sembako, Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, PIP, BOS, dan KIP Kuliah.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023 (dalam triliun Rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat	APBN	Realisasi sd November	% thd APBN	Growth (%)
Belanja K/L	1.000,84	890,18	88,94	1,41
Belanja Pegawai	272,89	234,91	86,08	2,14
Belanja Barang	374,12	324,20	86,66	(5,08)
Belanja Modal	210,32	189,18	89,95	23,58
Bantuan Sosial	143,52	141,89	98,87	(7,40)
Belanja Non-K/L	1.245,61	884,25	70,99	(11,96)
a.l. Belanja Pegawai	169,62	148,19	87,37	3,91
Belanja Lain-Lain	329,32	123,26	37,43	(57,22)
Total	2.246,46	1.774,44	78,99	(5,73)

Belanja Pegawai terealisasi Rp234,91 triliun atau 86,08 persen dari pagu. Realisasi Belanja Pegawai tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pusat/TNI/POLRI, termasuk pembayaran THR dan Gaji ke-13. Realisasi tersebut naik 2,14 persen (yoy).

Belanja Barang terealisasi Rp324,20 triliun atau 86,66 persen dari Pagu. Realisasi Belanja Barang tersebut menurun 5,08 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh pengelolaan dana kelapa sawit untuk program bio diesel dan pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19 pada 2022 yang relatif lebih besar. Di sisi lain, kinerja realisasi Belanja Barang

dimanfaatkan antara lain untuk : (1) pemeliharaan/perawatan sarana prasarana sumber daya air dan penanggulangan darurat akibat bencana, penyediaan akses rumah layak huni, dan preservasi jalan nasional melalui Kemen PUPR; (2) pemeliharaan/perawatan Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka mendukung alat utama sistem persenjataan (alutsista) pada Matra Darat, Matra Laut, Matra Udara dan Umum Integratif melalui Kemenhan; (3) pengadaan/dukungan logistik, pelayanan Kesehatan, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui POLRI; (4) peningkatan kualitas perguruan tinggi dan penyaluran dana Bantuan Operasional PTN melalui Kemendikbudristek; (5) penyaluran dana Bantuan

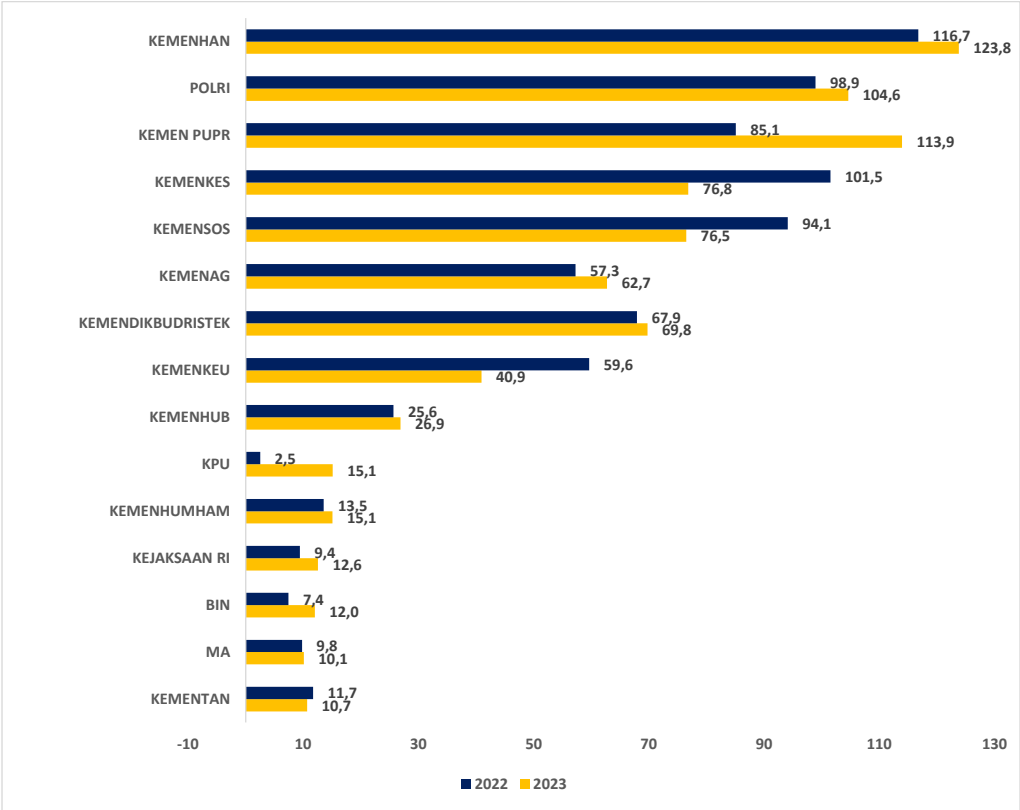
Operasional Sekolah (BOS) melalui Kemenag; dan (6) pembentukan Badan *Ad-hoc* dalam rangka kegiatan persiapan Pemilu 2024 melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Realisasi Belanja Modal mencapai Rp189,18 triliun atau 89,95 persen dari pagu. Realisasi tersebut tumbuh 23,58 persen (yoy), antara lain dipengaruhi oleh belanja infrastruktur pada Kemen PUPR, modernisasi alutsista oleh Kemenhan, pengadaan alat material khusus (almatsus) POLRI, serta pengadaan peralatan intelijen Kejaksaan dan Badan Intelijen Negara (BIN). Kinerja realisasi Belanja Modal digunakan antara lain untuk : (1) belanja modal peralatan dan mesin dengan pemanfaatan antara lain untuk pengadaan almatsus pada POLRI, pengadaan alutsista pada Kemenhan, dan pengadaan peralatan intelijen pada Kejaksaan dan BIN; (2) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dengan pemanfaatan antara lain untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, dan preservasi jalan dan jembatan oleh Kemen PUPR, serta pembangunan prasarana perkeretaapian, fasilitas bandar udara dan pelabuhan oleh Kemenhub; (3) Belanja Modal gedung dan bangunan dengan pemanfaatan antara lain untuk

pembangunan gedung kantor pemerintahan Kawasan IKN oleh Kemen PUPR, terminal bandara pada Kemenhub, gedung perkuliahan pendidikan tinggi pada Kemendikbudristek, rumah sakit pada Kemenkes, dan rusun prajurit TNI & POLRI.

Realisasi Bantuan Sosial mencapai Rp141,89 triliun, 98,87 persen dari pagu atau terkontraksi 7,40 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh pelaksanaan penebalan bantuan sosial berupa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng (Migor) dan BLT BBM pada 2022 namun tidak berlanjut pada 2023. Belanja bantuan sosial dimanfaatkan antara lain untuk: (1) penyaluran PKH bagi 9,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan program kartu sembako untuk 18,7 juta KPM pada Kemensos; (2) pembayaran bantuan iuran kepada 96,7 juta peserta PBI JKN melalui Kemenkes; (3) penyaluran bantuan PIP bagi 20,3 juta siswa dan bantuan KIP Kuliah bagi 949,2 ribu mahasiswa pada Kemendikbudristek dan Kemenag; serta (4) bantuan penanggulangan bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dimanfaatkan antara lain untuk bantuan stimulan rumah kepada 42,4 ribu KK terdampak bencana Kabupaten Cianjur.

Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu Terbesar
s.d 30 November 2023
TA 2022-2023 (triliun Rupiah)



Dari perspektif organisasi, realisasi Belanja pada 15 K/L dengan pagu terbesar berkontribusi 86,65 persen dari total realisasi Belanja K/L. Realisasi tersebut terutama didorong antara lain oleh realisasi Anggaran pada Kemenhan, POLRI, Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenhub, dan KPU..

Realisasi Belanja K/L juga dimanfaatkan untuk mendukung tahapan persiapan

dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dan mendukung pembangunan IKN. Hingga 2 Desember 2023, anggaran Pemilu telah terealisasi Rp23,4 triliun atau 77,0 persen dari pagu, Rp30,4 triliun. Realisasi anggaran melalui KPU dan Bawaslu Rp20,0 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk (i) pembentukan Badan *Ad hoc*; (ii) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; (iii) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan

daftar pemilih; (iv) masa kampanye Pemilu; serta (v) pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik. Selain itu, dukungan Pemilu juga dilaksanakan oleh 14 K/L lain dengan realisasi anggaran Rp3,4 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk (i) pengamanan Pemilu; (ii) pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu; dan (iii) diseminasi Informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu. Sampai dengan 30 November 2023, realisasi anggaran pembangunan IKN mencapai Rp15,63 triliun atau 53,67 persen dari pagu, Rp29,12 triliun. Realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh realisasi dari klaster infrastruktur sebesar Rp13,17 triliun yang dimanfaatkan antara lain untuk : (i) pembangunan istana negara dan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), (ii) pembangunan tower rusun ASN dan hankam, (iii) pembangunan jalan tol IKN, dan (iv) pembangunan bendungan Sepaku Semoi. Selain itu, dukungan anggaran IKN juga dipengaruhi oleh realisasi dari klaster noninfrastruktur Rp2,46 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk : (i) perencanaan pemindahan IKN, (ii) dukungan pengamanan POLRI dan (iii) operasional Otorita IKN.

Belanja NonK/L

Realisasi Belanja NonK/L mencapai Rp884,25 triliun atau terkontraksi 11,96 persen (yoy). Belanja NonKL antara lain digunakan untuk penyaluran manfaat pensiun, penyaluran subsidi (a.l. subsidi energi dan subsidi pupuk), kompensasi energi (BBM dan listrik), serta program kartu prakerja.

Belanja Pegawai NonK/L terealisasi Rp148,19 triliun atau 87,37 persen dari pagu. Realisasi tersebut antara lain digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan ASN/TNI/POLRI, termasuk pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan.

Belanja Barang NonK/L terealisasi Rp1,3 triliun atau 72,2 persen dari pagu. Realisasi tersebut antara lain digunakan untuk pembayaran kontribusi ke lembaga internasional, dana fasilitas persiapan proyek (PDF) pada skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pembiayaan operasional BUN pengelolaan kas negara, pengelolaan dukungan loss limit atas pelaksanaan Program PEN, dan BOP pemanfaatan pensiun.

Realisasi Belanja Subsidi mencapai Rp202,26 triliun, atau 67,76 persen dari pagu

dan turun 1,77 persen (yoy).

Realisasi tersebut terdiri atas:

(a) Subsidi Energi Rp134,37

triliun, mencakup Subsidi

BBM, Subsidi LPG Tabung 3

Kg, dan Subsidi Listrik; dan

(b) Subsidi nonEnergi Rp67,89

triliun, mencakup Subsidi

Pupuk, Subsidi Bunga Kredit

Program, Subsidi PSO, dan

Subsidi Pajak DTP. Realisasi

pembayaran Subsidi Energi

tersebut untuk penyaluran BBM

bersubsidi 14.934,70 ribu KL,

LPG Tabung 3 Kg 6,73 juta MT,

pelanggan listrik bersubsidi

sejumlah 39,72 juta pelanggan,

dan volume konsumsi listrik

bersubsidi 55,16 TWh.

Selanjutnya, realisasi Subsidi

nonEnergi meliputi antara lain

penyaluran pupuk bersubsidi

mencapai 5,71 juta ton,

Subsidi Bunga KUR diberikan

kepada 4,10 juta debitur

dengan total penyaluran KUR

mencapai Rp228,85 triliun, dan

Subsidi Bantuan Uang Muka

Perumahan untuk 207,30 ribu

unit rumah.

Realisasi Belanja Lain-Lain

mencapai Rp123,26 triliun

atau 37,43 persen dari pagu.

Realisasi tersebut terutama

digunakan untuk pembayaran

kewajiban kompensasi BBM

dan listrik Rp116,66 triliun.

Manfaat lainnya dari realisasi

Belanja Lain-Lain di antaranya

adalah pelaksanaan Program

Kartu Prakerja Rp4,29 triliun,

yang dimanfaatkan terutama

untuk biaya pelatihan dan

insentif bagi 1,14 juta peserta.

Halaman Ini Dikosongkan

Transfer ke
Daerah dan
Dana Desa

A scenic view of a village with traditional houses and a mountain in the background. The houses have thatched roofs and are built on a hillside. In the foreground, there is a rice paddy field with young rice plants. A large tree is visible on the right side of the image.

Sampai dengan 30
November 2023,
Penyaluran TKD
Mencapai Rp736,10
Triliun atau 90,35
Persen dari Pagu

Transfer ke Daerah

Penyaluran TKD sampai dengan 30 November 2023 mencapai Rp736,10 triliun

atau 90,35 persen dari pagu, tumbuh 0,60 persen (yoy). gu, turun 1,57 persen (yoy).

DANA BAGI HASIL

Hingga periode ini, penyaluran DBH mencapai Rp118,18 triliun atau 86,73 persen dari pagu, naik 0,36 persen (yoy). Capaian tersebut terutama dikarenakan oleh kenaikan pagu DBH SDA Minerba 31,23 persen (yoy), kenaikan pagu DBH SDA Migas 16,10 persen (yoy), serta

kenaikan pagu DBH CHT 36,39 persen (yoy).

DANA ALOKASI UMUM

Realisasi DAU mencapai Rp370,76 triliun, 93,63 persen dari pagu atau naik 0,47 persen (yoy). Peningkatan tersebut disebabkan oleh karena pada Oktober dilakukan penyaluran tahap III untuk DAU Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum, sehingga penyaluran alokasi bidang-bidang tersebut mencapai 99,03 persen dari pagu. Serta pada November semakin banyak pemda yang

REALISASI TKD TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2023
s.d 30 November 2023 (dalam miliar Rupiah)

Uraian	2022		2023		%
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	
Transfer ke Daerah	804,78	731,72	814,72	736,10	90,35
1. Dana Bagi Hasil	140,43	117,75	136,26	118,18	86,73
2. Dana Alokasi Umum	378,00	369,03	396,00	370,76	93,63
3. Dana Transfer Khusus	189,59	154,39	185,80	157,37	84,70
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	60,87	42,49	53,42	39,35	73,65
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	128,72	111,90	130,30	116,30	89,26
c. Hibah ke Daerah	-	-	2,08	1,72	82,69
4. Dana Otsus	20,44	20,44	17,24	17,24	100,00
5. Dana Keistimewaan D.I.Y	1,32	1,32	1,42	1,37	96,67
6. Dana Desa	68,00	63,31	70,00	65,18	93,11
7. Insentif Fiskal	7,00	5,49	8,00	6,00	74,97

1 mengajukan *reimbursement* DAK Penggajian PPPK.

DANA TRANSFER KHUSUS

Penyaluran DAK Fisik hingga periode ini mencapai Rp39,35 triliun, 73,65 persen dari pagu atau terkontraksi 7,40 persen (yoy). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pagu DAK Fisik berkurang yang berpengaruh pada nilai penyalurannya. Jika dilihat dari

persentase, penyaluran DAK Fisik sampai dengan periode ini lebih baik dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan persentase penyaluran tersebut dipengaruhi oleh perbaikan kinerja pelaksanaan kegiatan pada bidang Kesehatan & KB, bidang Jalan, dan bidang Perdagangan.

Sementara itu, DAK Nonfisik terealisasi Rp116,30 triliun, 89,52 persen dari pagu atau tumbuh 3,93 persen (yoy). Kenaikan tersebut terutama disebabkan peningkatan kepatuhan penyampaian syarat salur oleh pemda sehingga terdapat peningkatan pada kinerja penyaluran terutama pada Dana Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS) dibandingkan tahun sebelumnya.

DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Sampai dengan periode ini, Dana Otsus telah disalurkan seluruhnya yaitu sebesar Rp17,24 triliun (100 persen dari pagu alokasi). Hal ini mengacu pada PMK No.76/PMK.07/2022 pasal 36 ayat 7 dan pasal 54 ayat 7 bahwa dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur penyaluran Dana Otonomi Khusus tahap I, tahap II, dan/ atau tahap III secara lengkap dan benar sampai dengan bulan September dan/atau terdapat pagu alokasi yang belum disalurkan karena realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran dan Program penggunaan, penyaluran sisa pagu alokasi yang belum disalurkan dilakukan pada bulan November.

Namun demikian, realisasi penyaluran sampai dengan periode ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 15,63 persen (yoy) yang disebabkan pagu alokasi Dana Otsus Provinsi Aceh turun sangat signifikan pada 2023, yang semula sebesar 2 (dua) persen pada tahun 2022 menjadi 1 (satu) persen dari plafon DAU Nasional pada tahun 2023.

DANA DESA

Sampai dengan periode ini, Dana Desa disalurkan Rp65,18 triliun, 93,11 persen dari pagu atau tumbuh 2,96 persen (yoy), dikarenakan terdapat realisasi penyaluran tambahan Dana Desa.

Selanjutnya, penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian BLT Desa yang sampai periode ini telah disalurkan ke rekening kas desa Rp10,44 triliun kepada 2,9 juta KPM pada 74.931 desa. Selain itu, penggunaan Dana Desa 2023 ditentukan untuk program ketahanan pangan dan hewani, dana operasional pemerintah desa, program Kesehatan termasuk penanganan *stunting*, serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa.

INSENTIF FISKAL

Realisasi penyaluran IF sampai dengan 30 November 2023 mencapai Rp6,00 triliun, 74,97 persen dari pagu, atau naik 9,17 persen (yoy). Peningkatan capaian tersebut salah satunya disebabkan koordinasi dan pendampingan yang terus dilakukan kepada daerah sehingga mayoritas daerah penerima alokasi IF dapat menyampaikan dokumen syarat salur tahap II secara lengkap dan benar sesuai batas waktu yang ditentukan. Selain itu, angka capaian di atas juga masih akan bertambah mengingat masih terdapat sisa penyaluran alokasi IF kategori dukungan kesejahteraan masyarakat tahap II, yang dokumen syarat salurnya baru diterima di akhir November 2023. Insentif Fiskal kategori dukungan kesejahteraan masyarakat sendiri merupakan insentif fiskal yang diberikan kepada daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2023 pada empat indikator yakni penurunan *stunting*, penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan belanja daerah, dan penggunaan produk dalam negeri.

Halaman Ini Dikosongkan

Utang Dikelola Secara
Prudent dengan Risiko
yang Terkendali, Melalui
Komposisi yang Optimal
(Mata Uang, Suku Bunga,
dan Jatuh Tempo)

Pembiayaan Utang

Realisasi pembiayaan utang per 30 November 2023 mencapai Rp332,39 triliun atau 47,7 persen dari target. Pembiayaan utang 2023 ditargetkan lebih efisien sejalan dengan penurunan defisit dan pemanfaatan SAL. Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan pembiayaan utang yang *prudent* dan berkelanjutan dengan risiko terkendali pada level yang aman dan kredibel.

Realisasi pembiayaan utang terdiri dari realisasi SBN (Neto) Rp292,53 triliun dan

realisasi Pinjaman (Neto) Rp39,86 triliun. Dari sisi pinjaman dalam negeri, pada periode ini mencapai Rp8,36 triliun, terdiri atas realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri Rp11,17 triliun dan Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Rp2,81 triliun. Sementara itu, Pinjaman Luar Negeri terealisasi Rp31,50 triliun, terdiri atas Penarikan Pinjaman Luar Negeri Rp105,43 triliun dan Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Rp73,93 triliun.

Pembiayaan Utang

per 30 November 2023

f Dengan pengelolaan prudent dan akuntabel, realisasi pembiayaan terjaga baik dalam mendukung kinerja APBN



Sebagian besar realisasi pembiayaan dipenuhi melalui penerbitan SBN domestik melalui lelang reguler yang dilaksanakan melalui mekanisme pasar di mana investor menyampaikan penawaran (*bid*) kompetitif melalui Dealer Utama. Selama November 2023, secara bergantian, telah dilaksanakan lelang SBSN dan SUN setiap minggunya, yaitu pada tanggal 7, 14, 21, dan 28 November 2023. Kinerja lelang SBN pada November 2023 mencatatkan *bid to cover ratio* 2,33x, sementara rata-rata penawaran yang masuk sepanjang 2023 mencapai Rp35,02 triliun/lelang dan rata-rata nominal yang dimenangkan Rp12,24 triliun/lelang. Sebagai bagian dari pengelolaan portofolio pembiayaan, pemerintah juga telah melakukan pembelian kembali SUN dengan cara *Bilateral Buyback* pada 23 November 2023 yaitu melalui penukaran seri FR0070 dan FR077 dengan seri FR0100 dan FR0101 dengan total Rp15,4 triliun.

Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan SBN valas di pasar internasional sebagai pelengkap. Pada November 2023, pemerintah berhasil menerbitkan sukuk global berdenominasi dolar Amerika Serikat USD2,0 miliar. Penerbitan ini terdiri atas USD1,0 miliar dengan

tenor 5 tahun dan USD1,0 miliar dengan tenor 10 tahun. Sukuk global dengan tenor 10 tahun merupakan seri *Green Sukuk* dan merupakan penerbitan ke-6 di pasar internasional sejak 2018. Penerbitan ini membuktikan dedikasi dan komitmen jangka panjang pemerintah untuk pembiayaan hijau dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya dalam melawan perubahan iklim.

Selain itu, untuk mendukung peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan dan menyediakan alternatif instrumen investasi di masyarakat, pada 6 November 2023 pemerintah juga menerbitkan SBN ritel seri ORI024T3 dan ORI024T6 sejumlah Rp14,5 triliun. Total Investor ORI024T3 sebanyak 40.825 investor dengan investor baru sebanyak 16.063 orang, 39 persen. Sementara, total Investor ORI024T6 sebanyak 11.274 investor yang mana 3.746 orang, 33 persen merupakan investor baru. Generasi Milenial kembali mendominasi jumlah investor ORI024T3 dengan porsi 47 persen dan ORI024T6 dengan porsi 55 persen, sementara secara nominal masih didominasi oleh generasi *Baby Boomers*, 39 persen untuk ORI024T3 dan generasi X (29 persen) untuk ORI024T6. Selain itu, pada 10 November 2023 pemerintah telah melakukan *early redemption* SBN ritel seri ST009 Rp86,4 miliar yang diajukan oleh 1.095 investor. *Early redemption*

Komposisi Utang

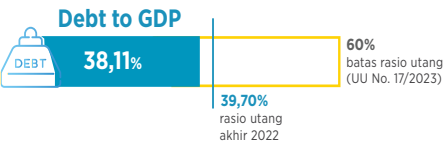
***Data per 30 November 2023**

Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara cermat dan terukur lewat komposisi mata uang, suku bunga, serta jatuh tempo yang optimal.

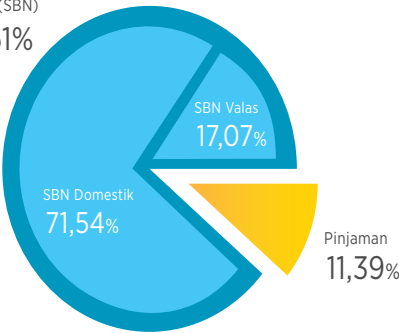
Posisi Utang

***Data per 30 November 2023**

Rp **8.041,01**
*dalam triliun Rupiah



Surat Berharga Negara (SBN)
88,61%



Surat Berharga Negara

Rp **7.124,98**

*dalam triliun Rupiah

• Domestik	Rp 5.752,25
Surat Utang Negara	Rp 4.677,88
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 1.074,37
• Valas	Rp 1.372,73
Surat Utang Negara	Rp 1.033,24
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 339,49

Pinjaman

Rp **916,03**

*dalam triliun Rupiah

• Pinjaman DN*	Rp 29,97
• Pinjaman LN*	Rp 886,07
Bilateral	Rp 268,57
Multilateral	Rp 540,02
Comercial Banks	Rp 77,48
Suppliers	Rp _

Pengelolaan utang pemerintah melalui penerbitan SBN mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, inklusi keuangan, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat dari *savings society* menjadi **investment society**.

Pemerintah terus berupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan.



ini merupakan fasilitas yang diberikan kepada investor ST009 untuk mencairkan sebagian pokok investasinya sebelum memasuki masa jatuh tempo.

Jumlah utang Pemerintah pada periode ini mencapai Rp8.041,01 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 38,11 persen. Nilai rasio utang tersebut lebih rendah dibandingkan akhir 2022 dan masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Rasio ini juga masih lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023-2026 di kisaran 40 persen. Pemerintah mengelola utang yang disiplin menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit di 2023 yang tetap mempertahankan *rating sovereign* Indonesia pada level *investment grade* (S&P dan Fitch (BBB/*Stable*), R&I (BBB+/*positive*)) di tengah dinamika perekonomian global saat ini.

Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara cermat dan terukur lewat komposisi mata uang, suku bunga, serta jatuh tempo yang optimal. Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan

utang luar negeri sebagai pelengkap, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,91 persen. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 88,61 persen. Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per periode ini, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (*average time maturity/ATM*) di kisaran 8 tahun.

Pengelolaan utang pemerintah melalui penerbitan SBN turut mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, inklusi keuangan, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat dari *savings society* menjadi *investment society*. Sejalan dengan hal tersebut, kepemilikan investor individu di SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya mencapai 2,95 persen menjadi 7,69 persen pada periode ini.

Selanjutnya, bagi lembaga keuangan, SBN berperan penting dalam memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan likuiditas, serta

menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko. Oleh sebab itu, perbankan merupakan pemegang SBN domestik terbesar, yang pada periode ini mencapai 27,67 persen. Kemudian diikuti perusahaan asuransi dan dana pensiun yang memiliki 18,48 persen.

Bank Indonesia memegang 18,35 persen SBN yang digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter. Investor asing hanya memiliki SBN domestik 14,89 persen termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing. Sementara, sisa kepemilikan SBN dipegang oleh institusi domestik lainnya untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan keuangan institusi bersangkutan.

Selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (*Green Sukuk*) dan *SDGs* (*SDG Bond* dan *Blue Bond*). Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem *online* juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.

Halaman Ini Dikosongkan

